



# Permasalahan dan Isu Strategis Daerah 4

## 4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Perumusan masalah ini dilakukan dengan memperhatikan gambaran umum wilayah serta hasil evaluasi capaian kinerja RPJMD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 – 2021. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah periode sebelumnya, untuk diatasi melalui program pembangunan pada periode berikutnya.

Salah satu permasalahan terkait dengan pembangunan, utamanya yang terjadi pada akhir RPJMD 2016 – 2021, tepatnya sejak tahun 2020 adalah bencana Pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Penanganan pandemi *Corona Virus Disease*, telah merubah banyak hal secara nasional maupun dunia dan berpengaruh sampai ke daerah-daerah, termasuk Kota Tidore Kepulauan. Pandemi Covid-19 yang sejatinya hanya merusak sistem kesehatan manusia, ternyata juga merusak sistem perekonomian bangsa dan negara, tidak terkecuali Kota Tidore Kepulauan yang sangat bergantung alokasi anggaran pembangunan lewat dana transfer dari pusat.

Pola refocusing anggaran pembangunan di daerah dengan terbitnya berbagai peraturan, telah menyebabkan perlambatan pembangunan infrastruktur ekonomi di daerah, paling tidak selama dua tahun. Termasuk melakukan perubahan prioritas dan sasaran pembangunan Kota Tidore Kepulauan, pada masa pandemi Covid-19 (Tahun 2020 – 2021). Yakni melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), yakni :

- 1) belanja untuk kesehatan
- 2) jaring pengaman sosial (*social safety net*),
- 3) pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak

Kebijakan pembatasan kegiatan pada masyarakat, termasuk aktivitas belajar mengajar di sekolah, menjadi catatan penting untuk melakukan akselerasi pembangunan di segala bidang. Sektor-sektor penyumbang pertumbuhan ekonomi juga tidak berkembang baik, seperti sektor jasa konstruksi. Hal ini juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di daerah yang anjlok di angka 1,9 persen di tahun 2020.

Kembali pada permasalahan pembangunan, maka berikut ini disajikan permasalahan secara sektoral dan permasalahan umum berikutnya. Secara sektoral permasalahan pembangunan di Kota Tidore Kepulauan dapat dijelaskan sebagai berikut:



### **1) Bidang Pendidikan**

Sarana dan prasarana sekolah (SD dan SMP) telah tersebar merata di seluruh wilayah, namun umumnya dalam kondisi yang kurang memadai. Selain itu, tenaga pengajar (guru) juga masih menjadi persoalan, seperti kualifikasi tenaga pengajar maupun sebarannya yang tidak merata di setiap sekolah. Hal ini berpengaruh pada kualitas antar setiap satuan pendidikan juga belum merata, belum seluruh sekolah terakreditasi (minimal B). Selain itu juga dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini, ketersediaan jaringan internet untuk mendukung proses belajar mengajar dan ujian sekolah masih sangat kurang terutama di beberapa wilayah di pulau Tidore seperti Tidore Timur dan wilayah Oba.



### **2) Bidang Kesehatan**

Jaringan Puskesmas dan Pustu telah tersebar merata di setiap Kelurahan/Desa, namun sebagian belum berfungsi dengan baik karena masih terdapat keterbatasan sarana prasarana dan tenaga medis sebagaimana standar yang telah ditetapkan.

Terkait pelayanan rujukan, dalam lima tahun terakhir terjadi peningkatan prasarana RSD Kota Tidore Kepulauan. Untuk itu selain pengembangan Rumah Sakit, juga perlu adanya penguatan Puskesmas dan Pustu agar

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam rangka mencegah penyakit belum merupakan gaya hidup masyarakat, perlu mengoptimalkan gerakan yang dilakukan secara struktural maupun kultural untuk mendukung hal tersebut.



### **3) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Infrastruktur daerah belum tersedia secara merata di seluruh wilayah. Kegiatan pembangunan yang dilakukan belum mampu mengatasi masalah umum dan mendukung pengembangan potensi unggulan, seperti penanganan banjir dan abrasi pantai yang belum tuntas dan belum terpenuhinya akses jalan menuju pusat produksi dan obyek wisata.

Selain itu, masih terdapat jalan yang bukan merupakan kewenangan kabupaten/kota dalam kondisi rusak tetapi mengganggu tingkat konektivitas, yakni ruas Payahe – Dehepodo, ruas Talaga dan sebagainya.

Prioritas penangangan jalan masih belum fokus karena belum terbaginya fungsi jalan (kolektor, lokal dan lingkungan) secara hirarkis, termasuk pembukaan ruas jalan baru menyebabkan tingginya serapan anggaran dan menurunkan kinerja jalan.

Sementara untuk rencana pembangunan irigasi Maldi masih terkendala

dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang belum menyediakan ruang untuk pembangunan daerah irigasi baru, serta status Daerah Irigasi dalam keputusan Menteri.

Untuk tata ruang, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) masih terkendala dengan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selain soal perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang masih belum optimal. Masih terdapat kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan pola dan struktur ruang, serta minimnya kegiatan pembangunan gedung yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).



#### **4) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Perumahan dan permukiman kumuh merupakan salah satu masalah di Kota Tidore Kepulauan. Penanganan perumahan dan permukiman kumuh telah dilakukan sejak tahun 2017, yakni seluas 98,8 hektar. Penanganannya lewat program dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yakni yang dikenal dengan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) serta berkolaborasi dengan program penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTHLH) dari Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Tidore Kepulauan. Hasilnya adalah terjadi pengurangan menjadi 62,86 hektar pada tahun 2019.



#### **5) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

Rasio petugas Satuan Polisi PP tidak sebanding dengan jumlah penduduk sehingga berpengaruh pada penegakan Peraturan Daerah yang belum terlaksana dengan baik. Masih terdapatnya potensi konflik masyarakat terkait batas wilayah administrasi kelurahan/desa.

Sarana dan prasarana, petugas serta operasional kegiatan pemadam kebakaran masih minim dan masih terbatas di Pulau Tidore (belum menjangkau seluruh kecamatan). Hal ini berpengaruh pada target kinerja Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) menjadi belum optimal;



#### **6) Bidang Sosial**

Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum dimutakhirkan secara terpadu. Selain itu, belum adanya program yang terintegrasi untuk membantu mengentaskan kemiskinan. Misalnya, bantuan sarana perikanan tangkap yang diarahkan untuk masyarakat miskin.



#### **7) Bidang Tenaga Kerja**

Salah satu kewenangan yang diberikan undang-undang kepada Pemerintah Daerah terkait bidang ini adalah melaksanakan pelatihan untuk dapat menghasilkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi pada bidang-bidang tertentu, dan hal ini belum bisa terlaksana dengan baik. Perlu adanya kolaborasi program dengan instansi terkait, seperti dengan Kementerian Tenaga Kerja dalam ini Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Maluku Utara di Ternate. Tenaga kerja yang berkompenten ini, tidak hanya mempermudah dalam mendapatkan pekerjaan, tetapi juga untuk dapat meningkatkan produktifitas di tempat kerja.

Sesuai data penduduk Kota Tidore Kepulauan berdasarkan golongan umur, maka dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kelompok umur 10 – 14 tahun dan 15 – 19 tahun adalah yang terbesar atau 20,6 persen dari total jumlah penduduk. Sedangkan berdasarkan jenis pekerjaan, terlihat bahwa ada tiga komponen yang menonjol, yakni : pelajar/mahasiswa, mengurus rumah tangga dan belum bekerja. Jumlah ketiga komponen ini sangat menonjol, yakni lebih dari 63 persen di tahun 2020. Ini menunjukkan bahwa masalah tenaga kerja pada kurun waktu 5 tahun ke depan harus menjadi perhatian serius, karena jika tidak diantisipasi dengan baik akan berpengaruh pada peningkatan angka pengangguran terbuka.



#### **8) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Pelembagaan pengarusutamaan gender masih harus terus ditingkatkan. Sebab walaupun dalam lima tahun yang lalu, peran perempuan di wilayah publik tidak pernah dilarang secara terang benderang, tetapi faktanya tidak banyak perempuan-perempuan yang bisa tampil di wilayah tersebut.

Selain pengarusutamaan gender, masih terdapat kasus kekerasan terhadap anak. Hal ini menandakan bahwa masyarakat masih membutuhkan edukasi terus menerus.



#### **9) Bidang Pangan**

Ketersediaan pangan utama masih rendah yang menyebabkan tingginya ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah. Kebutuhan pangan, produksi pangan termasuk didalamnya sumberdaya lahan dalam daerah belum terpetakan dengan baik, termasuk informasi dan sasaran pemasaran hasil pangan.

Selain itu, belum ditentukannya harga minimum pangan terhadap pangan lokal dalam rangka menjaga stabilitasi harga pangan.



#### **10) Bidang Pertanian**

Kebutuhan lahan untuk kegiatan pembangunan mengharuskan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan harus mengalokasikan anggaran untuk ganti kerugian dan santunan tanah. Namun dengan keterbatasan anggaran pembangunan, masalah ini dalam kurun waktu lima tahun terakhir masih terjadi dan menyisakan masalah untuk harus diselesaikan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.



#### **11) Bidang Lingkungan Hidup**

Kegiatan pembangunan yang dilakukan selalu memiliki dampak terhadap lingkungan. Masih terdapatnya aktivitas pembangunan baik oleh Pemerintah maupun Swasta yang belum memenuhi ketentuan atau peraturan perundang-undangan terkait izin lingkungan.

Padahal izin lingkungan ini penting dalam rangka mengontrol dan meminimalisir dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang dilakukan. Seperti adanya aktivitas penambangan galian C pada lokasi-lokasi yang bukan merupakan peruntukkannya.

Selain masalah tersebut, penanganan sampah dan limbah juga masih belum bisa maksimal. Perilaku masyarakat membuang sampah tidak

pada tempatnya, membuangnya ke laut dan kali/barangka masih terjadi. Hal tersebut selain karena rendahnya pemahaman, juga dipengaruhi minimnya sarana dan prasarana untuk penanganan sampah. Seperti TPA, TPS/ TPST/ TPS3R, kendaraan pengangkut sampah, dan lain sebagainya. Demikian pula halnya dengan limbah terutama limbah medis yang sampai saat ini Kota Tidore Kepulauan belum memiliki tempat pembuangan limbah medis sehingga limbahnya harus diangkut ke tempat pembuangan di Ternate.

Pelayanan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan masih di seputaran pulau Tidore dan Kecamatan Oba Utara. Perlu gerakan terpadu melalui kolaborasi program untuk menangani sampah di seluruh wilayah Kota Tidore Kepulauan.



### **12) Bidang Administasi Kependudukan dan Catatan Sipil**

Bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Maluku Utara, maka kinerja pelayanan e-KTP di Kota Tidore Kepulauan masih lebih baik. Namun di sisi lain, kinerja administrasi kependudukan yang masih perlu ditingkatkan adalah pemilikan Kartu Identitas Anak. Selain itu beberapa inovasi juga perlu secara terus menerus dilakukan untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di Kota Tidore Kepulauan.



### **13) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, belum ada sinergitas antara program pembangunan daerah dengan program yang ada di desa karena tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Hal ini bisa terlihat dari adanya program pembangunan yang seharusnya bisa diselesaikan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD, tetapi masih diusulkan untuk dibangun melalui anggaran perangkat daerah terkait. Selain itu, ketepatan waktu penyusunan perencanaan pembangunan di desa, seperti RKPDes, Musyawarah Desa (Musdes) maupun penyusunan APBDes belum dapat terlaksana tepat waktu.

Permasalahan lain yang juga membutuhkan perhatian adalah dari 49 desa yang ada, belum ada satupun desa yang memiliki predikat desa mandiri.



### **14) Bidang Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana**

Ada dua masalah yang belum terselesaikan dengan baik, yakni : masih tingginya angka rata-rata jumlah anak per keluarga dan kesadaran masyarakat untuk menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang masih rendah.



### **15) Bidang Perhubungan**

Infrastruktur terminal dan pelabuhan saat ini telah mulai dikembangkan, seperti Pelabuhan Rum, Loleo, Penyebarangan Fery Galala dan Dowora. Namun masih ada beberapa pelabuhan yang masih perlu dikembangkan seperti Pelabuhan Sarimalaha.

Permasalahan di bidang ini utamanya adalah moda transportasinya, baik darat maupun laut. Yakni moda transportasi yang dapat mendukung

kenyamanan dan meningkatkan keamanan.

Sebagai sektor yang strategis dan mendukung perekonomian daerah, transportasi umum di jazirah oba masih merupakan masalah. Dengan kondisi transportasi umum yang sulit dan mahal, sangat tidak mendukung pembangunan ekonomi di wilayah tersebut.

Selain moda transportasi, urusan penanganan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang saat ini berada pada Bidang Perhubungan juga masih terdapat masalah di mana masih banyak jalan umum yang belum memiliki lampu jalan dan kurangnya sarana dan prasarana pendukung seperti mobil *crane* untuk perbaikan lampu jalan.



#### **16) Bidang Komunikasi dan Informatika**

Belum seluruh wilayah terlayani jaringan internet disebabkan masih rendahnya sarana dan prasarana telekomunikasi. Hal ini turut berpengaruh pada belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan Pemerintahan Daerah, utamanya Pemerintah Kecamatan yang berada di jazirah oba.



#### **17) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah**

Walau berperan penting dalam perekonomian daerah, kontribusi Koperasi dan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi yang masih rendah. Pelaku UMKM belum terkonsolidasi dengan baik. Produk yang dihasilkan masih perlu ditingkatkan, utamanya dari sisi kemasan.

Pelaku UMKM juga belum terbiasa untuk mengakses modal pengembangan usaha lewat perbankan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang belum dimanfaatkan secara optimal karena kurangnya sosialisasi dan birokrasi pengurusan mulai dari desa/kelurahan yang masih menjadi keluhan dari pelaku UMKM.



#### **18) Bidang Penanaman Modal**

Kurun waktu lima tahun yang lalu, total investasi di Kota Tidore Kepulauan belum optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Penyebabnya adalah minimnya infrastruktur perekonomian dan indeks risiko bencana (IRB) tinggi. Kedua variabel tersebut menyebabkan faktor daya saing daerah menjadi rendah yang berpengaruh pada kegiatan investasi daerah.

Terlebih lagi kegiatan promosi potensi daerah juga masih belum maksimal serta didukung data potensi daerah yang memadai.



#### **19) Bidang Kepemudaan dan Olahraga**

Belum banyak atlet asal Kota Tidore Kepulauan yang berprestasi di tingkat nasional. Pembinaan terhadap atlet-atlit muda berbakat masih perlu ditingkatkan bersamaan dengan pengembangan sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan yang dapat menunjang prestasi atlet daerah. Selain itu pembinaan atlet juga perlu diarahkan untuk atlet yang sudah memiliki prestasi sehingga dapat memotivasi atlet-atlit lainnya.



### **20) Bidang Statistik**

Bidang statistik adalah salah satu bidang yang belum bisa bekerja optimal. Data yang tersedia masih berbeda-beda, serta belum terintegrasinya data sektoral dan data khusus. Permasalahannya adalah belum adanya kesepahaman lintas sektor untuk dapat menyediakan data sektoral secara baik.



### **21) Bidang Persandian**

Organisasi Perangkat Daerah belum terbiasa menggunakan sandi dalam komunikasi antar sesama perangkat daerah. Hal ini disebabkan karena rendahnya kompetensi ASN yang mengelola persandian serta rendahnya pengelolaan informasi persandian.



### **22) Bidang Kebudayaan**

Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK) sebagai indikator keberhasilan program ini belum dihitung. Perlu upaya untuk terus melestarikan dan perlindungan kebudayaan daerah dari ancaman akulturasi akibat pengaruh budaya luar pada generasi muda.

Kawasan cagar budaya butuh perlindungan dan pengembangan, sanggar seni masih butuh pembinaan, dan penulisan maupun pendokumentasian budaya dan seni daerah perlu ditingkatkan.

Hal terpenting lainnya adalah menjadikan bidang ini sebagai modal sosial dan pembangunan daerah.



### **23) Bidang Perpustakaan dan Kearsipan**

Rasio pengunjung perpustakaan masih rendah bila dibandingkan dengan jumlah penduduk. Salah satu indikator minat baca buku masyarakat masih rendah. Perlu peningkatan sarana, prasarana dan operasional kegiatan perpustakaan untuk turut memacu minat baca masyarakat.

Untuk kearsipan, belum seluruh OPD dapat menerapkan cara pengarsipan yang secara baik. Butuh adanya tenaga pustakawan dan arsiparis.



### **24) Bidang Pariwisata**

Potensi pariwisata (alam, budaya dan buatan) belum dapat dikelola secara optimal. Obyek wisata seperti Pantai Akesahu, Rum dan Maitara belum ditata dan dikelola dengan baik sebagai sebuah destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Terbatasnya infrastruktur pendukung pariwisata (seperti : akomodasi/ hotel, dive center) berpengaruh pada jumlah kunjungan dan lama waktu kunjungan.

Perlu adanya upaya kolaborasi dan sinergitas antara sesama perangkat daerah terkait maupun dengan pihak swasta dan masyarakat dalam mengembangkan potensi ini, seperti kerja sama dengan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata, agen travel, dan lain-lain. Lemahnya koordinasi dan keterpaduan sektor dan pelaku usaha dalam mendukung pembangunan pariwisata sangat menghambat

pertumbuhan bidang ini.

Prasarana lainnya (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang bereksprosi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah belum tersedia, sehingga sektor ekonomi kreatif belum berkembang.



### **25) Bidang Pertanian**

Beberapa permasalahan di bidang ini adalah : (1) Pengolahan pasca panen produksi pertanian untuk meningkatkan nilai produksi yang belum optimal; (2) Tingginya harga saprodi dan alsintan; (3) Masih kurangnya peremajaan tanaman perkebunan; (4) Pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan masih minim; (5) Pola pengembangan peternakan oleh masyarakat belum maksimal yang disebabkan karena pemahaman kegiatan peternakan masih tradisional; (6) Belum optimalnya pengelolaan usaha peternakan serta mahal biaya pakan dalam usaha peternakan. Untuk itu perlu dilakukan pendampingan secara optimal melalui para penyuluh pertanian.



### **26) Bidang Kelautan dan Perikanan**

Beberapa permasalahan di bidang ini yang perlu di atasi antara lain : (1) memperbaiki cara penanganan ikan pasca produksi, utamanya di atas kapal perikanan, untuk menjaga mutu dan nilai hasil produksi; (2) meningkatkan pemanfaatan potensi perikanan budidaya sebagai sumber pendapatan masyarakat; (3) meningkatkan sarpras pengolahan hasil ikan untuk meningkatkan hasil mutu hasil produksi; (4) lemahnya kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang ditandai dengan masih sering terjadi kegiatan penangkapan ikan dengan cara yang merusak (*illegal fishing*) seperti bom; (5) perlu pengembangan kelembagaan nelayan untuk ditingkatkan menjadi koperasi nelayan;



### **27) Bidang Perdagangan**

Beberapa permasalahan di bidang ini adalah : masih terjadi disparitas harga barang karena dipengaruhi kondisi geografis wilayah, belum adanya distributor menyebabkan belum terjaminnya ketersediaan kebutuhan bahan pokok dan barang penting lainnya. Selain itu infrastruktur perdagangan seperti pasar juga perlu ditata secara baik sehingga tidak ada ruang kosong di satu sisi, sementara di sisi lain masih terdapat pedagang barito yang berjualan sampai ke jalan raya.

Kehadiran tol laut di Pelabuhan Trikora juga belum dapat dimanfaatkan dengan optimal.



### **28) Bidang Perindustrian**

Produk industri kecil masih perlu ditingkatkan, utamanya dari sisi kualitas maupun pengemasannya. Keterbatasan modal serta belum terbiasanya mengakses modal dari perbankan (lewat program KUR) menyebabkan jumlah produksi belum optimal, dan berpengaruh pada harga yang relatif mahal dibanding barang-barang substitusi lainnya.





### **29) Bidang Transmigrasi**

Sarana prasarana dasar di permukiman transmigrasi utamanya untuk pelayanan dasar masih belum baik dan masih perlu di tingkatkan. Hal ini yang perlu ditingkat, serta meningkatkan aksesibilitas dari kawasan transmigrasi ke kawasan permukiman umum dan pusat ekonomi (pasar) belum baik, utamanya di kawasan transmigrasi Maldi.



### **30) Perencanaan Pembangunan**

Dokumen perencanaan belum didukung oleh data yang berkualitas dan mutakhir. Hal ini telah menyebabkan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tidak tepat sasaran terutama dalam menyelesaikan masalah dan mengembangkan potensi unggulan daerah.

Selain itu keselarasan antara dokumen perencanaan yang ada pada tingkat kota dan perangkat daerah masih rendah. Artinya visi besar Kepala Daerah yang ada dalam RPJMD belum sepenuhnya dapat diterjemahkan ke dalam Renstra Perangkat Daerah untuk dilaksanakan setiap tahunnya.

Masalah lain yang tidak kalah penting dalam perencanaan pembangunan adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam forum-forum formal perencanaan seperti Musrenbang di berbagai tingkatan (Desa, Kecamatan dan Kota) masih rendah. Hal ini disebabkan karena makin tereduksinya kepercayaan masyarakat pada forum-forum ini sebagai forum yang bisa membawa aspirasi masyarakat.



### **31) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**

Kualitas sumberdaya manusia ASN masih harus ditingkatkan, baik dari sisi kualifikasi maupun kompetensi, sambil terus mengembangkan sistem informasi kepegawaian untuk meningkatkan disiplin dan kinerja aparatur pemerintah daerah. Seiring dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mengalihkan jabatan struktural pelaksana (eselon IV) ke jabatan fungsional mulai tahun 2021, maka diklat fungsional teknis pada masing-masing perangkat daerah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan profesionalisme ASN.



### **32) Keuangan dan Inspektorat**

Sumber pendapatan daerah masih tergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat kecil, padahal kita memiliki potensi yang bisa dikelola dengan baik untuk meningkatkan PAD. Permasalahannya adalah beberapa potensi ini belum didesain secara baik bahkan ada sebagian yang sudah didesain tetapi belum dibangun secara tuntas sehingga belum dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan daerah. Beberapa contoh potensi daerah yang menjadi sumber pendapatan tetapi belum didesain atau dikelola dengan baik dan tuntas adalah : Penataan pulau Failonga, Maitara dan pantai Tugulufa sebagai daya tarik wisata yang belum tuntas, tempat parkir lokasi kuliner Tugulufa, situs sejarah Irian Barat, akses menuju benteng Tahula. Selain itu kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak juga mempengaruhi minimnya Pendapat Asli Daerah.

Di bidang pengawasan, juga masih terdapat masalah diantaranya :

tenaga auditor di inspektorat yang masih kurang dan tingkat maturitas pengendalian internal di bidang pengawasan juga masih perlu ditingkat dari saat ini yang sudah berada pada level 3. Hal ini penting dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.



### **33) Penelitian dan Pengembangan**

Dalam bidang penelitian dan pengembangan, ada tiga hal yang belum optimal : (1) Penelitian/kajian yang dilakukan belum fokus dalam rangka mengakselerasi kebijakan pembangunan daerah dan nasional; (2) Perencanaan dan pengambilan kebijakan yang dilakukan belum berdasarkan pada hasil penelitian; (3) Penerapan inovasi daerah masih rendah.

Dari permasalahan sektoral di atas, maka secara umum permasalahan pembangunan yang ada di Kota Tidore Kepulauan dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, masing-masing (A) Permasalahan Bidang Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya;

(B) Permasalahan Pengembangan Ekonomi dan Investasi; dan (C) Masalah Tata Kelola Pemerintahan. Dimana penjelasannya sebagai berikut.

#### **4.1.1. Permasalahan Bidang Sumber Daya Manusia, Sosial dan Budaya**

##### **1) Belum Optimalnya Pembangunan Sumberdaya Manusia.**

Walaupun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tidore Kepulauan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, naik dari 68,37 pada tahun 2016 menjadi 70,53 pada tahun 2020, akan tetapi angka tersebut masih di bawah IPM Kota Ternate dan IPM Nasional, serta berbanding terbalik dengan angka kemiskinan yang juga cenderung meningkat.

Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan IPM masih belum optimal. Perlu ada peningkatan pada bidang pendidikan, derajat kesehatan masyarakat dan pendapatan masyarakat.

Untuk angka rata-rata lama sekolah, capaian Kota Tidore Kepulauan sudah terbilang baik (14,3 tahun) bila dibandingkan dengan angka rata-rata sekolah nasional (13,00 tahun).

Angka harapan hidup (AHH), Kota Tidore Kepulauan masih terpaut dua angka di bawah AHH nasional yakni 71,5 tahun. Hal ini membutuhkan upaya kerja keras untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, baik tingkat pelayanan dasar, pelayanan rujukan maupun gaya hidup sehat.

Data dari Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan, dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016 – 2020), penyakit yang paling tinggi (rata-rata 35 persen) di derita oleh masyarakat Kota Tidore Kepulauan adalah Infeksi Saluran Pernapasan Akut atau ISPA.

Dari data 10 penyakit teratas yang diderita tersebut, terdapat lima penyakit yang selalu masuk dalam daftar 10 penyakit teratas, yakni : ISPA, demam atau Observasi Febris, maag atau Dispepsia, nyeri pada otot atau Myalgia, tekanan darah tinggi atau Hipertensi dan radang tenggorokan atau Pharyngitis.

Sementara itu, dari sisi Pengeluaran Per Kapita, walaupun untuk masyarakat Kota Tidore Kepulauan cenderung naik dari tahun ke tahun, yakni pada tahun 2015 sebesar Rp 8,2 juta per kapita per tahun menjadi Rp 8,8 juta per kapita per tahun pada tahun 2020. Meskipun demikian, angka ini masih dibawah rata-rata nasional, rata-rata Provinsi Maluku Utara dan Kota Ternate. Untuk itu, diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Kota Tidore Kepulauan.

## **2) Belum Optimalnya Penanggulangan Kemiskinan.**

Berdasarkan data BPS Kota Tidore Kepulauan, persentase penduduk miskin di Kota Tidore Kepulauan dari tahun 2016 – 2020 cenderung meningkat, yakni dari 5,07 persen (tahun 2016) menjadi 6,52 persen (tahun 2020). Hal ini mendorong kecenderungan persentase peningkatan penduduk miskin di Provinsi Maluku Utara.

Persentase penduduk miskin di Kota Tidore Kepulauan berbeda dengan Kota Ternate sebagai kota tetangga, dimana persentase penduduk miskin walaupun cenderung naik, tetapi angkanya masih jauh di bawah angka persentase Kota Tidore Kepulauan, yakni pada kisaran 2,07 persen di tahun 2016 dan 3,14 persen di tahun 2019.

Dalam rangka optimalisasi upaya penanggulangan kemiskinan, ada dua hal yang perlu mendapat perhatian, yakni :

- (1) Menyusun dan menetapkan kriteria miskin yang sesuai dengan karakteristik daerah Kota Tidore Kepulauan.
- (2) Melakukan validasi data *by name by address* masyarakat miskin.
- (3) Membangun kolaborasi program lintas sektor untuk penanggulangan kemiskinan.

## **3) Belum Optimalnya Pembangunan Kebudayaan Sebagai Modal Sosial dan Pembangunan Daerah.**

Alat ukur yang digunakan dalam melihat pembangunan kebudayaan adalah Indeks Pembangunan Kebudayaan, yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) dimensi pengukuran, yaitu: Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi dan Gender. Sedangkan wujud dari kebudayaan itu sendiri terbagi 3 (tiga), yaitu : *Art* (seni), *Artefak* (benda) dan *Activity* (Kegiatan).

Berangkat dari penjelasan singkat di atas, maka Kota Tidore Kepulauan merupakan satu dari sekian banyak daerah di Indonesia yang masyarakatnya masih memegang teguh nilai-nilai tradisi dan budaya lokal. Hal ini bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang masih melaksanakan tradisi dan ritual-ritual adat seperti *ratib tajibesi* (debus), setiap marga masih memiliki rumah adat yang disebut dengan "*folasou*" dengan ritual adatnya masing-masing pada waktu-waktu tertentu. Kehidupan dalam suasana tolong-menolong dan gotong-royong sudah menjadi ritme kehidupan masyarakat yang terlembagakan dalam istilah-istilah budaya lokal seperti :Mayae, Babari dan Marong. Istilah-istilah ini biasa dipakai dalam kegiatan gotong-royong untuk pembangunan rumah atau pembersihan kebun. Selain itu juga terdapat Wisata Seni dan Budaya berupa Rumah Adat Gimalaha Tomayou, Rumah Adat Tidore, Upacara Ritual Kesultanan, Legu Gam, Seni Kerajinan Bambu, seni Kerajinan Geraba, pandai Besi Toloa, Tarian Soya-Soya, Tarian Dana-Dana dan Bambu gila.

Semua hal yang terkait dengan kebudayaan di atas, sesungguhnya merupakan potensi unggulan sekaligus ciri khas yang membedakan Kota Tidore Kepulauan dengan daerah lainnya, yang apabila didesain dan dikelola secara baik akan dapat menjadi modal sosial dan pembangunan untuk meningkatkan perekonomian daerah.

#### **4.1.2. Permasalahan Pengembangan Ekonomi dan Investasi**

##### **1) Masalah Infrastruktur.**

Beberapa permasalahan infrastruktur dalam mendukung perekonomian daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Infrastruktur ekonomi belum tersedia secara merata di seluruh wilayah dan kondisinya kurang baik. Sebagai contoh masih terdapat ruas jalan dalam kondisi rusak sehingga menyebabkan terganggunya pelayanan dasar dan perputaran ekonomi, seperti ruas jalan Payahe – Dehepodo di Kecamatan Oba Selatan dan Oba.
- Belum tersedianya sistem drainase yang baik telah menyebabkan terjadinya banjir di beberapa titik yang sangat mengganggu kegiatan perekonomian masyarakat. Sebagai contoh masih terjadinya banjir di Kecamatan Oba Utara akibat luapan kali Akeoba, banjir di Kecamatan Oba Tengah akibat luapan kali Akelamo, Aketobatu, Akeguraci. Sementara banjir di Kecamatan Oba akibat luapan kali Aketayawi, yang mana penyebabnya adalah luapan air sungai karena tersumbat atau tidak seimbang volume aliran sungai dan volume air.
- Infrastruktur pada pusat-pusat pelayanan masih belum memadai. Sebagai contoh beberapa perangkat daerah yang memberikan pelayanan dasar seperti Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dukcapil dan Bapenda serta beberapa kantor Camat dan Puskesmas dalam kondisi rusak atau kurang memadai, bahkan ada yang belum memiliki kantor. Hal ini jika tidak segera diatasi, maka akan menjadi citra buruk bagi pemerintah daerah.
- Infrastruktur yang dibangun belum sepenuhnya mendukung pengembangan obyek wisata dan pusat-pusat produksi yang bisa meningkatkan perekonomian daerah. Sebagai contoh jalan-jalan menuju pusat produksi pertanian yang belum memadai, akses jalan menuju beberapa obyek wisata seperti Benteng Tahula dan Taman Nasional Aketajawe yang belum memadai.
- Berdasarkan RPJPD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005 – 2025, maka proses pembangunan di Kota Tidore Kepulauan telah masuk pada periode terakhir yaitu tahun 2021 – 2025, tapi sampai saat ini belum terlihat adanya perubahan wajah kota ke arah yang lebih baik. Hal ini lebih banyak disebabkan karena pembangunan infrastruktur kota belum menyentuh pada pengembangan beberapa obyek wisata baik wisata sejarah, alam dan lainnya seperti situs sejarah eks Irian Barat yang belum tertata dengan baik sehingga terlihat kumuh, penataan beberapa Taman Kota dan Pantai Tugulufa sebagai ruang publik yang belum tuntas. Untuk itu, maka dengan spirit *Tidore Jang Foloji* (Tidore Sangat Indah) dalam visi pembangunan daerah tahun 2021–2026, maka pembangunan infrastruktur kota harus diarahkan untuk merubah wajah kota menjadi lebih indah.

## 2) Masalah Investasi

Dalam kurun waktu lima tahun yang lalu, total investasi di Kota Tidore Kepulauan belum optimal untuk mendukung perekonomian daerah. Penyebabnya dapat diuraikan sebagai berikut :

### (1) minimnya infrastruktur perekonomian

Infrastruktur perekonomian masih perlu di tingkat, seperti jalan, jembatan dan pelabuhan.

### (2) indeks risiko bencana (IRB) yang masih tinggi.

Status IRB tinggi di Kota Tidore Kepulauan perlu diantisipasi dengan kegiatan penanggulangan bencana, untuk dapat memperkecil IRB. Sehingga mampu menjadi salah satu daya tarik kegiatan investasi.

### (3) belum optimalnya kegiatan promosi potensi daerah

Promosi potensi daerah yang dilakukan belum optimal. Dibutuhkan upaya yang maksimal dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi, termasuk media sosial.

Selain itu dibutuhkan data yang valid dan mutakhir sehingga investor dapat membaca peluang kegiatan investasi yang diarahkan ke Kota Tidore Kepulauan.

### (4) kemudahan izin berusaha

Kemudahan izin berusaha ini dapat dilakukan dengan menggunakan *Online Single Submission (OSS)*, yakni adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi guna mempermudah dan mempercepat proses perizinan dengan mengacu pada Peraturan yang berlaku.

Untuk mendukung OSS ini, dibutuhkan Rencana Rinci Tata Ruang dalam hal ini Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang saat ini belum dimiliki oleh Kota Tidore Kepulauan.

## 3) Masalah Pengembangan Ekonomi Kreatif

Berdasarkan data perkembangan Covid-19, maka dampak pandemi covid-19 akan masih terasa sampai pada beberapa tahun ke depan, dan elemen masyarakat yang paling merasakan dampak dari pandemi ini adalah para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Untuk itu maka dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan upaya pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro sebagai bentuk dari pengembangan ekonomi kreatif sesuai dengan pembagian kewenangan pada kabupaten/kota.

### 4.1.3. Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan

Untuk mendukung terwujudnya masyarakat sejahtera sebagaimana tertuang dalam visi daerah tahun 2021 - 2026, maka permasalahan dalam tata kelola pemerintahan juga harus benar-benar diperhatikan. Beberapa permasalahan umum terkait tata kelola pemerintahan di Kota Tidore Kepulauan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- Kualitas SDM Aparatur masih rendah, baik dari sisi kualifikasi, kompetensi, maupun tingkat disiplin. Seiring dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mengalihkan jabatan struktural pelaksana (eselon IV) ke jabatan fungsional mulai tahun 2021, maka diklat fungsional teknis pada masing-masing perangkat daerah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme ASN.
- Perencanaan pembangunan yang masih terlalu luas dan belum adanya konektivitas antara dokumen perencanaan di lingkup pemerintah daerah dengan perencanaan di masing-masing perangkat daerah telah menyebabkan implementasinya dalam pembangunan tidak tepat sasaran dan berpengaruh terhadap nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang masih rendah.
- Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat rendah dibandingkan pendapatan transfer dari pusat, padahal kita memiliki beberapa potensi yang bisa digunakan untuk meningkatkan PAD. Sesuai data pada bab III, maka sumber pendapatan terbesar adalah dari dana transfer (DAU, DAK, DBH, DID) yakni rata-rata 78,47 persen, sementara PAD baru berkisar 6,94 persen. Permasalahannya adalah beberapa potensi yang dimiliki belum didesain secara baik bahkan ada sebagian yang sudah didesain tetapi belum dibangun secara tuntas sehingga belum dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan daerah. Beberapa contoh potensi daerah yang menjadi sumber pendapatan tetapi belum didesain atau dikelola dengan baik dan tuntas adalah : Penataan obyek wisata pulau Failonga, Maitara dan pantai Tugulufa, tempat parkir lokasi kuliner Tugulufa, situs sejarah perjuangan Irian Barat, dan akses menuju benteng Tahula.
- Selain itu, dari sisi alokasi belanja pembangunan, belum dapat memaksimalkan penggunaannya untuk belanja modal. Rata-rata alokasi belanja modal baru mencapai 19,3 persen. Sementara komponen belanja operasional rata-rata 68,57 persen, dimana sebagian besarnya (53 persen dari belanja operasional) diperuntukkan untuk belanja pegawai, yakni untuk pembayaran gaji dan tunjangan.
- Masih lemahnya kolaborasi dan koordinasi lintas sektor, baik antar sesama perangkat daerah maupun dengan pihak swasta dan masyarakat dalam pembangunan.
- Sistem penyajian data yang belum akurat sehingga mempengaruhi proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan menjadi tidak tepat sasaran.

## 4.2 Isu Strategis Pembangunan Daerah

Selain merumuskan permasalahan, perlu ditetapkan isu strategis pembangunan daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2021 - 2026 dengan kriteria : (1) Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan; (2) Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; (3) Luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat; (4) Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan

daerah; (5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; (6) Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Isu strategis yang dimaksud adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Atau dapat dikatakan bahwa isu strategis merupakan potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Analisis terhadap isu strategis juga dilakukan dengan menelaah agenda pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam dokumen RPJMN, agenda pembangunan Provinsi Maluku Utara sebagaimana termuat dalam RPJMD Provinsi Maluku Utara, serta RTRW Kota Tidore Kepulauan dan kebijakan serta agenda pembangunan Kabupaten/Kota berbatasan yang dapat mempengaruhi kebijakan pembangunan Kota Tidore Kepulauan.

#### **4.2.1 Telaahan Agenda Pembangunan**

##### **A. Arahan RPJMN 2020 - 2024**

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yakni : (1) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia; (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Untuk mencapai misi tersebut, maka terdapat lima arahan Presiden untuk dilaksanakan, yakni : (1) Pembangunan SDM; (2) Pembangunan infrastruktur; (3) Penyederhanaan regulasi; (4) Penyederhanaan birokrasi; dan (5) Transformasi ekonomi. Hal ini dilakukan untuk melaksanakan tujuh agenda pembangunan, yaitu :

- (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
- (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
- (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Kota Tidore Kepulauan dalam RPJMN disebutkan masuk dalam koridor pertumbuhan untuk prioritas pembangunan Wilayah Maluku, selain Ternate, Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan.

Dalam tahun 2020-2024, pembangunan Wilayah Maluku akan mencakup kegiatan prioritas: (1) Pengembangan sektor unggulan; (2) Pengembangan kawasan strategis; (3) Pengembangan kawasan perkotaan; (4) Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi; dan (5) Penataan kelembagaan dan keuangan daerah. Untuk Kota Tidore Kepulauan, beberapa proyek prioritas yang merupakan major project adalah sebagai berikut :

- 1) Pengembangan Sektor Unggulan. Dengan komoditi unggulan antara lain : pala, lada, cengkeh, kelapa, batubara, perikanan tangkap dan budidaya, dan nikel.
- 2) Pengembangan Kawasan Perkotaan. Yakni pengembangan kawasan perkotaan di Kota Ambon, Kota Tual, Kota Ternate dan pembangunan Kota Baru Sofifi
- 3) Peningkatan produksi perikanan tangkap
- 4) Penyediaan air baku di kawasan perkotaan
- 5) Pembangunan Desa Terpadu

Terkait arahan RPJMN yang mana prioritas pembangunan dilaksanakan di Kota Tidore Kepulauan serta memiliki korelasi dengan kepentingan pembangunan di daerah adalah :

1. Pengembangan Kota Baru Sofifi, yang masuk dalam proyek prioritas strategis (*major project*).
2. Tidore sebagai salah satu lokasi (dari 20) sasaran warisan budaya yang diregenerasi (*cultural heritage regeneration*).

## B. Arahan RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020 – 2024

Visi RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020 – 2024 adalah : **Maluku Utara Sejahtera**. Kata SEJAHTERA tersebut akronim dari kata Sehat dan Cerdas Berbudaya (sumberdaya manusianya), Maju (infrastruktur dan wilayahnya), agamis dan harmonis (masyarakatnya), tumbuh ekonominya (secara inklusif dan berkelanjutan), serta reformis dan adil (pemerintahan dan pelayanan publiknya)—sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai.





Sementara misi RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020 – 2024 yaitu :

- (1) Membangun sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya;
- (2) Mengakselerasi pembangunan infrastruktur, konektivitas dan pengembangan wilayah;
- (3) Membangun tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, aman, damai dan harmonis;
- (4) Membangun perekonomian daerah yang inklusif dan berkualitas dengan orientasi pada nilai tambah dan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan; dan
- (5) Memantapkan tata Kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkeadilan.

Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Maluku Utara 2020 – 2024 adalah :

- 1) Mewujudkan pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing tinggi, produktif, setara dan mengapreseasi kebudayaan.

Sasarannya adalah :

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
  2. Meningkatnya taraf pendidikan serta apreseasi masyarakat pada khazanah kebudayaan daerah
  3. Meningkatkan peran dan produktifitas pemuda dalam pembangunan
  4. Meningkatnya kualitas perempuan dan anak
  5. Meningkatnya kualitas pengendalian dan tata kelola kependudukan
- 2) Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang handal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta kemajuan dan daya saing wilayah

Sasarannya adalah :

6. Meningkatnya akses masyarakat pada infrastruktur pelayanan dasar yang layak dan terjangkau
  7. Meningkatnya konektivitas yang mendorong integrasi wilayah
  8. Meningkatnya pilar pemerataan perkembangan dan kemajuan wilayah
- 3) Mewujudkan peran agama dan tata nilai lokal sebagai landasan spiritual, moral dan etik masyarakat yang mendorong suasana kehidupan yang aman, damai dan harmonis

Sasarannya adalah :

9. Meningkatnya derajat kesalehan masyarakat yang mendorong hadirnya empati, toleransi dan solidaritas sosial dalam menghadapi perbedaan
  10. Meningkatnya keamanan, ketentraman, ketertiban dan kenyamanan di lingkungan masyarakat
- 4) Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing tinggi dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat berlandaskan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan

Sasarannya adalah :

11. Meningkatnya kualitas kemandirian pangan dan daya saing petani/ nelayan

12. Meningkatnya nilai tambah pengelolaan sumberdaya alam strategis dan potensi unggulan daerah melalui investasi dan inovasi yang menciptakan kesempatan kerja produktif
  13. Menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah
  14. Meningkatnya efektivitas pengurangan kesenjangan dan kemiskinan di seluruh wilayah melalui pemberdayaan ekonomi rakyat yang inklusif dan memandirikan masyarakat
  15. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim
- 5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, inovatif, melayani dan demokratis
- Sasarannya adalah :
16. Meningkatnya transparansi, akuntabilitas kinerja, kualitas pengelolaan keuangan, serta pelayanan publik pemerintah daerah
  17. Meningkatnya kebebasan sipil dan hak-hal politik masyarakat serta menguatnya peran dan kualitas lembaga-lembaga demokrasi di daerah.

Isu strategis RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020 – 2024, adalah :

### 1) Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Maluku Utara terus meningkat, namun masih berada di bawah rata-rata nasional, sehingga diperlukan suatu lompatan kuantum (*quantum leap*) kebijakan untuk dapat memenuhi sasaran pembangunan jangka Panjang daerah yang mengamanatkan kualitas SDM berada di atas rata-rata nasional pada tahun 2025.

Selain IPM, Indeks Pembangunan Gender (IPG) juga naik, tapi masih di bawah rata-rata nasional.

Kelompok isu strategis ini terbagi atas lima isu strategis sebagai berikut :

**Pertama**, Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Tantangan pembangunan kesehatan Maluku Utara ke depan adalah tentang menghasilkan generasi yang sehat agar mampu menjalani kehidupan secara produktif.

**Kedua**, Peningkatan taraf pendidikan, kesempatan belajar dan apreseasi masyarakat pada khasanah kebudayaan daerah.

**Ketiga**, Peningkatan peran dan produktifitas pemuda dalam pembangunan. Angkatan kerja Maluku Utara didominasi oleh kaum muda usia >15 – 40 tahun, namun dengan produktifitas yang masih rendah.

**Keempat**, Peningkatan kualitas perempuan dan anak.

**Kelima**, Peningkatan kualitas pengendalian dan tata kelola kependudukan.

### 2) Pemerataan Infrastruktur dan Daya Saing Wilayah

Isu strategis kelompok ini terdiri dari tiga isu strategis sebagai berikut :

**Pertama**, Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar. Akses air dan sanitasi yang aman dan layak dan terjangkau di Maluku Utara masih rendah berada di bawah rata-rata nasional. Rasio elektrifikasi terus meningkat tapi belum merata antar wilayah. Mengurangi kawasan kumuh juga masih memerlukan perhatian.

**Kedua**, Peningkatan konektivitas yang mendorong integrasi wilayah. Masih banyak desa/UPT yang belum terakses jaringan telekomunikasi seluler. Selain itu walau infrastruktur jalan, Pelabuhan dan bandara terus di bangun, namun masih ada desa/UPT yang belum dapat dilalui kendaraan roda empat sepanjang tahun.

**Ketiga**, Pemerataan pengembangan wilayah. Indeks ketimpangan wilayah Maluku Utara lebih rendah dari rata-rata nasional. Namun masih banyak desa dengan status desa tertinggal menurut Indeks Pembangunan Desa

### 3) Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi

Isu kelompok strategis ini terdiri dari tiga isu strategis sebagai berikut :

**Pertama**, Peningkatan kualitas kemandirian pangan dan kesejahteraan petani/ nelayan. Tantangan kedepan dalam pembangunan pangan Maluku Utara adalah meningkatkan kualitas pangan, yaitu bagaimana meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan, serta kelautan dan perikanan yang disertai dengan upaya hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan membuat pangan dapat disimpan untuk menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan petani/nelayan.

**Kedua**, Peningkatan investasi bernilai tambah yang memperluas kesempatan kerja produktif dan pekerjaan layak. Investasi bernilai tambah di Maluku Utara masih didominasi sektor pengolahan dan pemurnian mineral (*smelterisasi*). Tantangan kedepan adalah bagaimana mendorong hilirisasi yang lebih luas pada sektor pertanian dan perikanan, dimana kedua sektor ini merupakan tulang punggung utama sebagian besar masyarakat Maluku Utara. Pariwisata yang menyimpan begitu banyak potensi belum berkontribusi secara optimal bagi perekonomian daerah yang dan kesejahteraan masyarakat.

**Ketiga**, Peningkatan efektifitas pengentasan kemiskinan dengan memperkuat ekonomi daerah. Tantangan pengentasan kemiskinan Maluku Utara adalah bagaimana mengefektifkan upaya penanggulangan kemiskinan dengan masuk langsung ke jantung kemiskinan, yaitu perbaikan daya beli dengan membangun kemandirian.

### 4) Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Isu ini menjadi sangat strategis mengingat tujuan pembangunan berkelanjutan meminta untuk mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan penunahan keanekaragaman hayati; melindungi dan menggunakan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan; serta mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya.

### 5) Harmonisasi Sosial dan Kondusifitas Wilayah

Kondisi harmonis dan kondusif diperlukan untuk menciptakan daya saing yang berkelanjutan, serta tujuan pembangunan berkelanjutan yang meminta untuk mendorong masyarakat damai.

## 6) Tata Kelola Pemerintahan dan Kesetaraan

Isu ini merujuk pada pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang belum optimal dan berdampak pada masih rendahnya kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020 – 2024, proyek strategis yakni proyek super prioritas, meliputi :

- 1) Percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* dan *wasting*, sebagai bentuk intervensi gizi spesifik untuk pencegahan dan penanganan *stunting* dan *wasting*, melalui implementasi Kartu Maluku Utara Sehat;
- 2) Pembangunan infrastruktur dasar berbasis komunitas, yang difokuskan untuk mendukung langsung intervensi gizi sensitive dalam upaya pencegahan dan penanganan *stunting* dan *wasting*. Program meliputi penyediaan akses air bersih, sanitasi dan penyambungan listrik bagi rumah tangga miskin/ rentan miskin yang terdaftar pada Kartu Maluku Utara Sehat;
- 3) Peningkatan kualitas, produktivitas dan daya saing tenaga kerja, melalui Kartu Maluku Utara Cerdas untuk mencegah anak putus sekolah/ baru lulu tapi tidak melanjutkan untuk bersekolah Kembali pada jalur pendidikan formal, serta penduduk usia kerja (>15 – 40 tahun) dari keluarga miskin/ rentan miskin yang berstatus pekerja berusaha sendiri/ keluarga/ tak dibayar dan berijazah paling tinggi SMP/ sederajat untuk bersekolah Kembali melalui jalur pendidikan non formal (Paket A/B/C Vokasi tematik);
- 4) Pengembangan daya saing UMKM, kewirausahaan dan ekonomi umat, melalui Kartu Maluku Utara Tumbuh;
- 5) Pengembangan kluster industri agro-marine terpadu, yang diharapkan melalui pendanaan sektor swasta;
- 6) Percepatan infrastruktur SPBE, untuk percepatan penerapan SPBE secara umum dan implementasi Kartu Maluku Utara secara khusus;
- 7) Pembangunan wilayah perkotaan Sofifi, sesuai dengan arahan kebijakan pengembangan wilayah perkotaan Sofifi.

## C. Arahan RPJPD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005 – 2025

Visi RPJPD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005 – 2025 adalah “ **Terwujudnya Kota Tidore Kepulauan yang Maju, Mandiri dan Berperadaban**”. Ada lima misi yang diemban dalam RPJPD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005 – 2025, yakni :

1. Mewujudkan Sumberdaya Manusia Berkualitas dan Kehidupan Yang Damai
2. Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Tangguh dan Berdaya Saing
3. Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Demokratis

4. Mewujudkan Masyarakat Berperadaban (*Civility, al-Madaniyyah*)
5. Mewujudkan Kota Tidore Kepulauan Sebagai Pusat Pemerintahan

Arahah RPJM ke-4 dalam RPJPD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2021 – 2025 adalah:

- Peningkatan tamatan Perguruan Tinggi yang memiliki kecakapan, ketrampilan dan kemampuan sumberdaya manusia yang dibutuhkan untuk pembangunan daerah.
- Modernisasi sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta ketersediaan sumberdaya pendidikan dan kesehatan di daerah perdesaan.
- Peningkatan taraf gizi dan kesejahteraan ekonomi masyarakat, serta pemberdayaan perempuan di desa dan kota.
- Struktur perekonomian semakin maju yang ditandai dengan keterpaduan industri pertanian, kelautan dan sumberdaya alam lainnya serta berkembangnya sektor jasa.
- Masyarakat memiliki akses modal perbankan dengan bunga kredit yang murah serta berkembangnya penyertaan modal sektor swasta dalam pembangunan ekonomi berbasis sumberdaya alam.
- Pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas berkesinambungan dapat dicapai, sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2026 setara dengan daerah-daerah yang berpendapatan menengah dengan jumlah tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin yang minim.
- Kondisi maju dan mandiri di bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya menjadi lebih nyata dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di berbagai aspek, terselenggaranya pemerintahan yang demokratis, penegakan hukum yang persuasif serta terciptanya kedamaian dan kerukunan hidup yang dilandasi semangat kebersamaan, persatuan dan kesatuan.
- Citra sebagai kota budaya tercipta melalui keramahan dan tata perilaku sosial masyarakat terhadap setiap tamu daerah dan wisatawan yang datang.

Indikator kinerja pembangunan dalam RPJPD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005 – 2025 terdiri atas 12 indikator sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 4.1 berikut.

**Tabel 4.1. Indikator Kinerja RPJPD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005 – 2025**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun		Target/Sasaran Tahun 2025
			2004	2008	
1	Pertumbuhan Penduduk	%	2,43	3,01	5,20
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,71	5,79	7,00
3	PDRB Perkapita	%	2,51	3,08	4,13
4	Tingkat inflasi	%	4,82	11,25	8,91
5	Partisipasi angkatan kerja				
	a. Jumlah	Orang	28.627	36.132	90,029
	b. Persentase	%	57,96	84,21	71,54
6	Angka pengangguran				
	a. Jumlah	Orang	5.034	4.830	8.319
	b. Persentase	%	17,58	11,25	9,47
7	Pengangguran terbuka				
	a. Jumlah	Orang	4.007	1,944	626
	b. Persentase	%	14,00	4,54	7,53
8	Angka Melek Huruf	%	93,12	96,80	97,61
9	Rata-rata Lama Sekolah	Thn	7,2	8,3	9,5
10	Angka Putus Sekolah usia>15 thn	%	4,88	3,19	2,00
11	Angka Kematian Bayi	%	24,58	20,00	18,00
12	Angka Harapan Hidup	Thn	63,9	64,5	67,0
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			63	68,1	71,3

Sumber : RPJPD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005 – 2025

#### **D. Arahana Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tidore Kepulauan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013 – 2033, tujuan penataan ruang wilayah kota adalah “Terwujudnya Kota Tidore Kepulauan sebagai kota bahari yang nyaman, aman, produktif, dan berkelanjutan dengan didukung oleh kegiatan pertanian-perkebunan dan pariwisata yang maju dan mandiri serta mampu mempertahankan nilai-nilai kebudayaan dan fungsi ekologis serta memperhatikan aspek kebencanaan?”.

Dalam rangka pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud, maka kebijakan penataan ruang yang dilakukan adalah :

- a. Pemantapan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat kegiatan berskala regional;
- b. Peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan skala lokal dan regional;
- c. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem sarana prasarana umum skala lokal dan regional;
- d. Pemeliharaan dan pelestarian fungsi kawasan lindung dan ruang terbuka hijau;
- e. Pengendalian kegiatan budidaya yang berdampak kepada kelestarian lingkungan hidup;
- f. Perwujudan pengembangan kegiatan budi daya yang optimal dan efisien;

- g. Pengembangan kawasan strategis perspektif ekonomi, sosial budaya, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

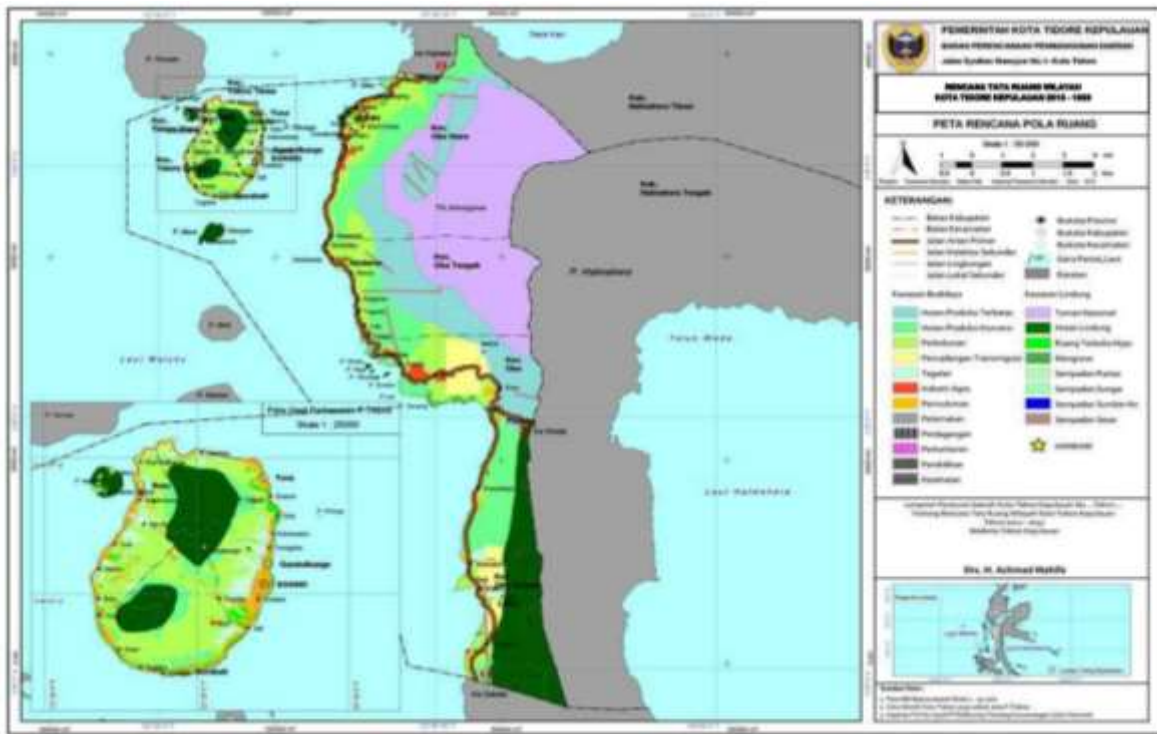
Struktur ruang dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 merencanakan hirarki sistem pusat pelayanan kota, sebagai berikut :

- (1) Pusat pelayanan kota, meliputi :
  - a. Kelurahan Soasio, Gamtufkange, Tomagoba, Indonesiana, Goto dan Tuguwaji sebagai pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan jasa dan relegius; dan
  - b. Kota Sofifi di rencanakan untuk melayani seluruh Kabupaten/Kota, regional dan internasional.
- (2) Sub pusat pelayan Kota, meliputi :
  - a. Akelamo dan Loleo sebagai sub pusat pelayanan kegiatan pemerintahan dan jasa;
  - b. Gita Payahe, sebagai sub pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan dan jasa;
  - c. Maldi Lifofa, sebagai sub pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan dan pendidikan; dan
  - d. Kelurahan Rum dan Rum balibunga, sebagai sub pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan dan jasa.
- (3) Pusat pelayanan lingkungan, meliputi :
  - a. Kawasan di Kelurahan Tomalou Kecamatan Tidore Selatan dengan fungsi perikanan dan perdagangan;
  - b. Kawasan di Kelurahan Mareku, Kelurahan Ome Kecamatan Tidore Utara dengan fungsi pendidikan, pelayanan kesehatan dan pengembangan agama Islam;
  - c. Kawasan pulau maitara dengan fungsi pariwisata dan perikanan;
  - d. Kawasan Tului talagamori dengan fungsi perdagangan dan pelayanan kesehatan; dan
  - e. Kawasan Mafututu dengan fungsi pemerintahan, pariwisata dan jasa.

Sementara untuk pola ruang, dengan total wilayah perencanaan sebagaimana disebutkan seluas 13.862,86 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari luas daratan seluas 9.116,36 km<sup>2</sup>, terbagi atas :

- a. Rencana pengembangan kawasan lindung, meliputi :
  - a. Kawasan hutan lindung;
  - b. Kawasan yang memberikan perlindungan di bawahnya;
  - c. Kawasan perlindungan setempat;
  - d. Kawasan ruang terbuka hijau;
  - e. Kawasan suaka alam dan cagar budaya;
  - f. Kawasan rawan bencana alam; dan
  - g. Kawasan lindung lainnya.
- b. Rencana pengembangan kawasan budidaya, meliputi :
  - a. Kawasan peruntukan perumahan;
  - b. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
  - c. Kawasan peruntukan perkantoran;
  - d. Kawasan peruntukan industri;
  - e. Kawasan peruntukan pariwisata;
  - f. kawasan peruntukan ruang terbuka non hijau;

- g. kawasan ruang evakuasi bencana;
- h. kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal; dan
- i. Kawasan Peruntukan lainnya (Kawasan peruntukan pendidikan; Kawasan peruntukan kesehatan; Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan; Kawasan peruntukan pertanian; Kawasan peruntukan perikanan; Kawasan peruntukan lahan cadangan pengembangan kota; Kawasan peruntukan hutan produksi; dan Kawasan peruntukan pertambangan).



**Gambar 4.1.**

Peta Pola Ruang Kota Tidore Kepulauan Berdasar Perda Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013 – 2033

Sementara terkait rencana revisi terkait Perda Nomor 25 Tahun 2013, disebutkan bahwa Tujuan penataan ruang wilayah Kota Tidore Kepulauan adalah “mewujudkan Lima Rasai (yakni kota yang ramah, aman, serasi dan indah) yang mendukung pengembangan daya saing wilayah (sektor pendidikan, pariwisata, pertanian, kelautan dan perikanan) serta menjaga kelestarian sejarah, budaya dan fungsi ekologi”.

Arahan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan tersebut adalah :

- a. membagi sistem perkotaan dengan mempertimbangkan orientasi sebagai pusat pelayanan kegiatan administrasi, ekonomi, dan/atau budaya;
- b. membagi wilayah perencanaan pengembangan daya saing wilayah sesuai dengan karakter fisik dan kegiatan sebagai dasar pengembangan kawasan (pendidikan, pariwisata, pertanian, kelautan dan perikanan);
- c. meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar pusat kegiatan berskala lokal, regional dan nasional;



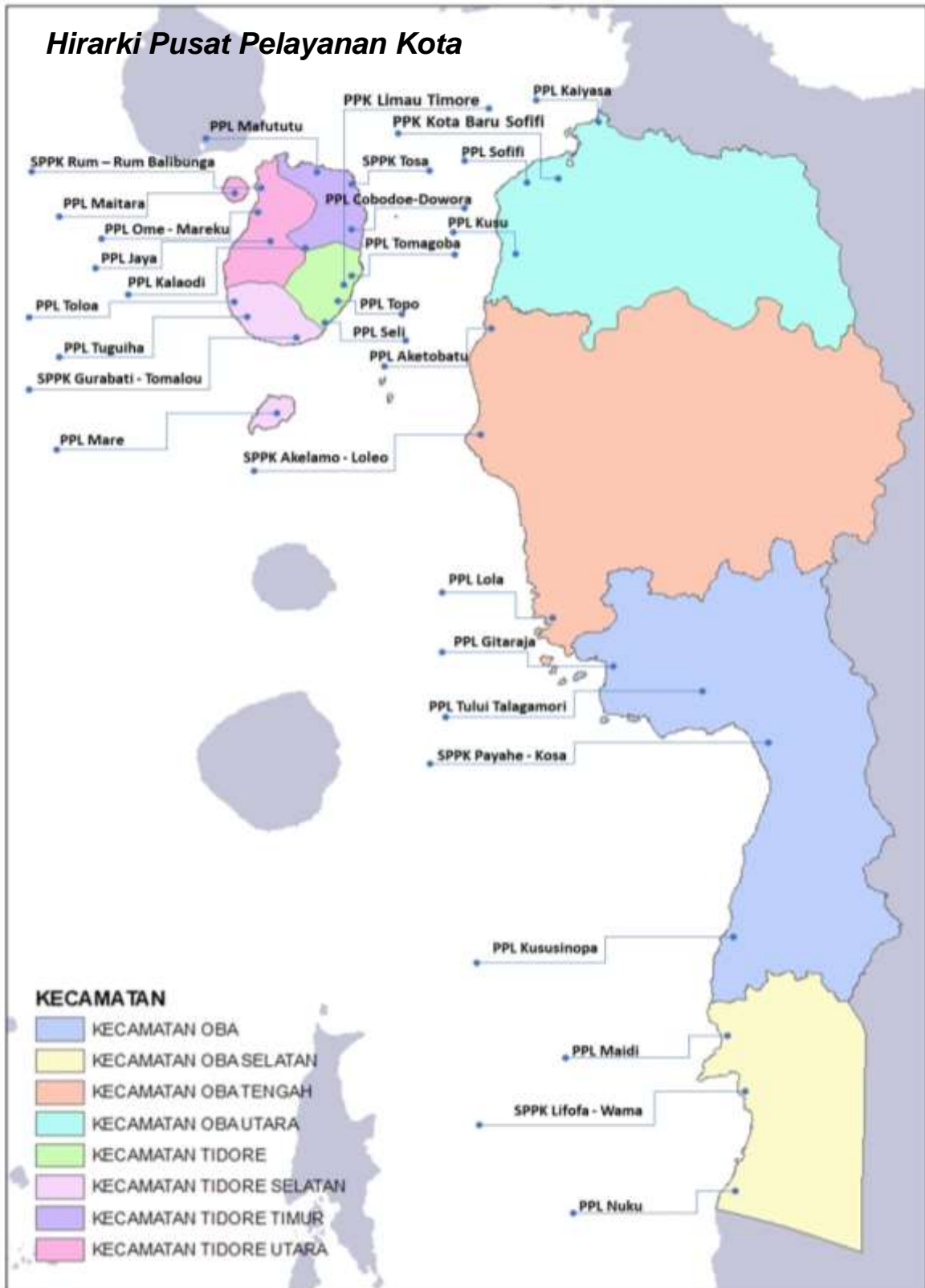
- d. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem sarana prasarana umum skala lokal, regional dan nasional;
- e. mengembangkan dan mengendalikan kegiatan berdasarkan pola ruang dan struktur ruang dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
- f. mengembangkan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, sosial dan budaya, serta lingkungan hidup.

Luas wilayah perencanaan meliputi seluruh wilayah administrasi Kota Tidore Kepulauan dengan total luas wilayah daratan lebih kurang 170.315,81 hektar, yang terbagi atas Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) atas : BWP I Kecamatan Tidore; BWP II Kecamatan Tidore Selatan; BWP III Kecamatan Tidore Utara; BWP IV Kecamatan Tidore Timur; BWP V Kecamatan Oba Utara; BWP VI Kecamatan Oba Tengah; BWP VII Kecamatan Oba; dan BWP VIII Kecamatan Oba Selatan.

Sistem Pusat Pelayanan atau hirarki pelayanan kota yang direncanakan meliputi PPK, SPPK dan PPL. PPK atau Pusat pelayanan yakni pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional. Ada dua PPK, yakni PPK Limau Timore dan PPK Kota Baru Sofifi.

Sementara SPPK atau Sub Pusat Pelayanan Kota merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani BWP. Dalam RTRW Kota Tidore Kepulauan, telah diatur ada enam SPPK, masing-masing : (1) SPPK Rum Balibunga di BWP III Kecamatan Tidore Utara; (2) SPPK Gurabati di BWP II Kecamatan Tidore Selatan; (3) SPPK Tosa di BWP IV Kecamatan Tidore Timur; (4) SPPK Akelamo di BWP VI Kecamatan Oba Tengah; (5) SPPK Payahe di BWP VII Kecamatan Oba; dan (6) SPPK Lifofa di BWP VIII Kecamatan Oba Selatan.

Selanjutnya adalah PPL atau Pusat Pelayanan Lingkungan yakni pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kecamatan/ kelurahan. Ada 20 PPL yang telah ditentukan, yakni : (1) PPL Topo; (2) PPL Ome; (3) PPL Maitara; (4) PPL Jaya; (5) PPL Tuguiha; (6) PPL Mare; (7) PPL Toloa; (8) PPL Dowora; (9) PPL Kalaodi; (10) PPL Mafututu; (11) PPL Sofifi; (12) PPL Kaiyasa; (13) PPL Kusu; (14) PPL Aketobatu; (15) PPL Lola; (16) PPL Gita Raja; (17) PPL Talagamori; (18) PPL Kususinopa; (19) PPL Maidi; dan (20) PPL Nuku.



**Gambar 4.2**  
Peta Hirarki Sistem Pusat Pelayanan

Sistem jaringan jalan meliputi : jalan kolektor primer, kolektor sekunder, jalan lokal primer, jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan.



**Gambar 4.3**  
Jaringan Jalan di Kota Tidore Kepulauan Berdasarkan Fungsi

Terminal penumpang, meliputi :

- 1 Terminal penumpang tipe B Sofifi Kecamatan Oba Utara;
- 2 Terminal penumpang tipe C Soasio di Kecamatan Tidore;
- 3 Terminal penumpang tipe C Payahe di Kecamatan Oba; dan
- 4 Terminal penumpang tipe C Rum Balibunga di Kecamatan Tidore Utara.



**Gambar 4.4**  
Jaringan Terminal Darat

Terminal barang meliputi:

- 1 Terminal barang di pelabuhan Trikora Kecamatan Tidore;
- 2 Terminal barang di pelabuhan Gitaraja Kecamatan Oba; dan
- 3 Terminal barang di pelabuhan Maidi Kecamatan Oba Selatan.

Pelabuhan Penyeberangan, terbagi atas Pelabuhan penyeberangan Kelas II (Rum Balibunga, Dowora dan Galala) dan Kelas III Gita).

Untuk sistem transportasi laut, didukung oleh pelabuhan sebagai berikut :

**Tabel 4.2 Rencana Pelabuhan Laut di Kota Tidore Kepulauan**

No.	Nama Pelabuhan	Lokasi (Kec/ Kel/ Desa)	Status Pelabuhan	
			Eksisting	Rencana
1	Pelabuhan Trikora	Tidore, Indonesiana	Pengumpan	Pengumpul
2	Pelabuhan Rakyat Sarimalaha	Tidore, Indonesiana	Pengumpan Lokal	Pengumpan Lokal
3	Pelabuhan Rakyat Kotamabopo	Tidore, Tomagoba	Pengumpan Lokal	Pengumpan Lokal
4	Dermaga Kesultanan Tidore	Tidore, Soasio	Pengumpan Lokal	Pengumpan Lokal
5	Tersus Pelabuhan PPI Goto	Tidore, Goto	Pengumpan Lokal	Pengumpan Lokal
6	Pelabuhan Rakyat Rum	Tidore Utara, Rum	Pengumpan Lokal	Pengumpan Lokal
7	Pelabuhan Penyeberangan Rum	Tidore Utara, Rum Balibunga	Pengumpan Regional	Pengumpang Regional
8	Tersus PLTU Rum	Tidore Utara, Rum Balibunga	Pengumpan Lokal	Pengumpan Lokal
9	Pelabuhan Rakyat Maitara	Tidore Utara, Maitara	Pengumpan Lokal	Pengumpan Lokal
10	Pelabuhan Rakyat Maitara Selatan	Tidore Utara, Maitara Selatan	Pengumpan Lokal	Pengumpan Lokal
11	Pelabuhan Rakyat Maitara Tengah	Tidore Utara, Maitara Tengah	Pengumpan Lokal	Pengumpan Lokal
12	Tersus Pelabuhan Wisata Maitara	Tidore Utara, Maitara	Pengumpan Lokal	Pengumpan Lokal
13	Tersus Pelabuhan Wisata Rum	Tidore Utara, Rum	-	Pengumpan Lokal
14	Pelabuhan Rakyat Jikocobo	Tidore Timur, Jikocobo	Pengumpan Lokal	Pengumpan Lokal
15	Pelabuhan Rakyat Itokici	Tidore Timur, Itokici	Pengumpan Lokal	Pengumpan Lokal
16	Pelabuhan Rakyat Mafututu	Tidore Timur, Mafututu	Pengumpan Lokal	Pengumpan Lokal
17	Tersus Pelabuhan Wisata Akesahu	Tidore Timur, Akesahu	Pengumpan Lokal	Pengumpan Lokal
18	Tersus Pelabuhan Wisata Failonga	Tidore Timur, P. Failonga	Pengumpan Lokal	Pengumpan Lokal
19	Pelabuhan Penyeberangan Dowora	Tidore Timur, Dowora	Pengumpan Lokal	Pengumpan Lokal
20	Pelabuhan Rakyat Tongowai	Tidore Selatan Tongowai,	Pengumpan Lokal	Pengumpan Lokal
21	Pelabuhan Rakyat Tomalou	Tidore Selatan, Tomalou,	Pengumpan Lokal	Pengumpan Lokal
22	Pelabuhan Rakyat Marekofo	Tidore Selatan, Marekofo	Pengumpan Lokal	Pengumpan Lokal
23	Pelabuhan Rakyat Maregam	Tidore Selatan, Maregam	Pengumpan Lokal	Pengumpan Lokal
24	Pelabuhan Rakyat Guraping	Oba Utara, Guraping	Pengumpan Lokal	Pengumpan Regional
25	Pelabuhan Penyeberangan Galala	Oba Utara, Galala	Pengumpan Lokal	Pengumpan Regional
26	Pelabuhan Rakyat Armada Semut Sofifi	Oba Utara, Sofifi	Pengumpan Lokal	Pengumpan Regional
27	Pelabuhan Laut Sofifi	Oba Utara, Oba	Pengumpan Regional	Pengumpan Regional
28	Tersus PT Semen Tonasa	Oba	Pengumpan Lokal	Pengumpan Regional
29	Tersus Pelabuhan Wisata Pulau Sibiu	Oba Utara, Pulau Sibiu		Pengumpan Lokal
30	Pelabuhan Rakyat Somahode	Oba Utara, Somahode	Pengumpan Lokal	Pengumpan Lokal
31	Pelabuhan Rakyat Paceda	Oba Tengah, Paceda	Pengumpan Lokal	Pengumpan Lokal
32	Tersus PLTU	Oba Tengah, Pasigau	Pengumpan Lokal	Pengumpan
33	Pelabuhan Rakyat Loleo	Oba Tengah, Loleo	Pengumpan Lokal	Pengumpan Regional
34	Pelabuhan Rakyat Tadupi	Oba Tengah, Tadupi	Pengumpan Lokal	Pengumpan Lokal
35	Tersus Pelabuhan Wisata Pulau Woda	Oba Tengah, P. Woda	-	Pengumpan Lokal
36	Tersus Pelabuhan Wisata	Oba, P. Raja	-	Pengumpan Lokal

No.	Nama Pelabuhan	Lokasi (Kec/ Kel/ Desa)	Status Pelabuhan	
			Eksisting	Rencana
	Pulau Raja			
37	Tersus Pelabuhan Wisata Pulau Guratu	Oba, P. Guratu	-	Pengumpan Lokal
38	Tersus Pelabuhan Wisata Pulau Tameng	Oba, P. Tameng	-	Pengumpan Lokal
39	Tersus Pelabuhan Wisata Pulau Joji	Oba, P. Joji	-	Pengumpan Lokal
40	Pelabuhan Rakyat Payahe	Oba, Payahe	-	Pengumpan Lokal
41	Pelabuhan Laut Gita	Oba, Gita	Pengumpan Lokal	Pengumpan Lokal
42	Pelabuhan Rakyat Payahe	Oba, Payahe	Pengumpan Lokal	Pengumpan Lokal
43	Pelabuhan Rakyat Kusunopa	Oba, Kusunopa	Pengumpan Lokal	Pengumpan Lokal
44	Pelabuhan Laut Maidi	Oba Selatan, Maidi	Pengumpan Lokal	Pengumpan Lokal
45	Pelabuhan Rakyat Wama	Oba Selatan, Wama	Pengumpan Lokal	Pengumpan Lokal
46	Pelabuhan Rakyat Lifofa	Oba Selatan, Lifofa	Pengumpan Lokal	Pengumpan Lokal
47	Pelabuhan Rakyat Tagalaya	Oba Selatan, Tagalaya	Pengumpan Lokal	Pengumpan Lokal
48	Pelabuhan Rakyat Nuku	Oba Selatan Nuku	Pengumpan Lokal	Pengumpan Lokal

Sumber : RTRW Kota Tidore Kepulauan

Revisi RTRW Kota Tidore Kepulauan juga merencanakan sistem jaringan transportasi udara, yakni bandar udara Sultan Nuku di Aketobololo – Akelamo di Kecamatan Oba Tengah. Direncanakan berupa bandara pengumpul skala sekunder.

Untuk sistem jaringan energi yang direncanakan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:

(1) infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya, yakni :

- a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Soasio di Kecamatan Tidore, PLTD Payahe di Kecamatan Oba, PLTD Sofifi di Kecamatan Oba Utara, PLTD Maregam di Kecamatan Tidore Selatan;
- b. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tidore di Rum Balibunga Kecamatan Tidore Utara dan PLTU Sofifi di Desa Aketobatu Kecamatan Oba Tengah.
- c. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Tidore di Kecamatan Tidore Utara, dan PLTMG Sofifi di Kecamatan Oba Utara;
- d. Pembangkit Listrik Tenaga Biomass (PLTBM) di Kecamatan Oba Tengah;
- e. Pengembangan pembangkit listrik yang ramah lingkungan.

(2) infrastruktur penyalur tenaga listrik dan sarana pendukungnya, yakni :

- a. jaringan transmisi tenaga listrik berupa Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), kabel laut dan saluran transmisi lainnya;
- b. jaringan distribusi tenaga listrik berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) dan saluran distribusi lainnya; dan
- c. gardu induk yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari transmisi tenaga listrik.

Sementara sistem jaringan telekomunikasi meliputi : jaringan tetap dan jaringan bergerak seluler. Jaringan tetap berupa pengembangan jaringan kabel distribusi utama, kabel distribusi sekunder dan kabel distribusi tersier hingga menjangkau ke seluruh wilayah. Sementara jaringan bergerak seluler berupa penyediaan menara telekomunikasi di seluruh wilayah.

Untuk sistem jaringan sumber daya air, terbagi atas:

- (1). Sistem jaringan irigasi, yakni :
  - a. jaringan irigasi primer di Daerah Irigasi Tayawi Kecamatan Oba dan Daerah Irigasi Maldi di Kecamatan Oba Selatan;
  - b. jaringan irigasi sekunder di Daerah Irigasi Tayawi Kecamatan Oba dan Daerah Irigasi Maldi di Kecamatan Oba Selatan;
- (2). Sistem pengendalian banjir, yakni :
  - a. jaringan pengendalian banjir berupa sudetan, alur pengendali banjir (*flood way*), dan kolam retensi di Kecamatan Oba Utara, Oba Tengah, Oba dan Oba Selatan;
  - b. bangunan pengendalian banjir berupa tanggul dan *revetment* di Kecamatan Oba Utara, Kecamatan Oba Tengah, Kecamatan Oba dan Kecamatan Oba Selatan.
- (3). Bangunan sumber daya air, yakni :
  - a. Bendungan Sofifi di Kecamatan Oba Utara, Bendungan Multi Guna Akelamo di Kecamatan Oba Tengah, dan Bendungan Tayawi di Kecamatan Oba;
  - b. Embung Konservasi Gurabunga dan Embung Topo di Kecamatan Tidore, Embung Gurabati di Kecamatan Tidore Selatan, Embung Mafututu dan Embung Kalaodi di Kecamatan Tidore Timur, Embung Jaya dan Embung Fabaharu di Kecamatan Tidore Utara, Embung Sofifi di Kecamatan Oba Utara, Embung Yehu di Kecamatan Oba Tengah, dan Embung Sigela di Kecamatan Oba Tengah
  - c. Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Gurabunga dan Topo di Kecamatan Tidore, Kalaodi dan Mafututu di Kecamatan Tidore Timur, Gurabati di Kecamatan Tidore Selatan, Jaya dan Fabaharu di Kecamatan Tidore Utara, Sofifi di Kecamatan Oba Utara, Akelamo dan Yehu di Kecamatan Oba Tengah, Tayawi dan Sigela di Kecamatan Oba.

Rencana revisi Perda Nomor 25 Tahun 2013 juga merevisi infrastruktur yang terbagi atas:

- a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
- b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
- c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- d. sistem jaringan persampahan;
- e. sistem jaringan evakuasi bencana;
- f. sistem drainase;
- g. jalur sepeda; dan
- h. jaringan pejalan kaki.

RTRW Kota Tidore Kepulauan juga telah merencanakan pola ruang wilayah kota meliputi :

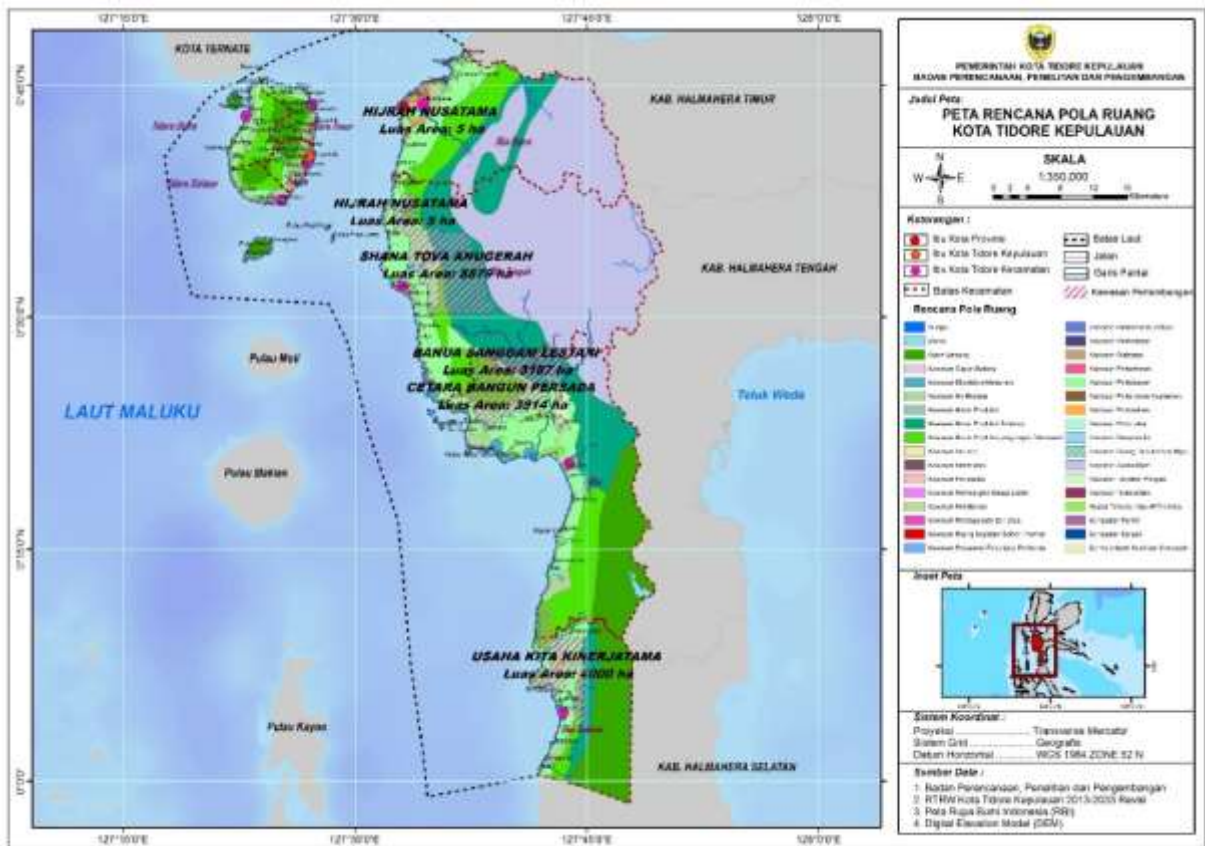
- 1) Kawasan lindung, yang terbagi atas :

- a. Badan Air (BA);
  - b. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya (PTB);
  - c. Kawasan Perlindungan Setempat (PS);
  - d. Ruang Terbuka Hijau (RTH);
  - e. Kawasan Konservasi (KS);
  - f. Kawasan Cagar Budaya (CB); dan
  - g. Kawasan Ekosistem Mangrove (EM).
- 2) Kawasan budidaya, yang terbagi atas :
- a. badan jalan (BJ);
  - b. kawasan hutan produksi (KHP);
  - c. kawasan pertanian (P);
  - d. kawasan perikanan (IK);
  - e. kawasan pertambangan dan energi (TE);
  - f. kawasan peruntukan industri (KPI);
  - g. kawasan pariwisata (W);
  - h. kawasan permukiman (PM);
  - i. kawasan perdagangan dan jasa (K);
  - j. kawasan perkantoran (KT);
  - k. kawasan transportasi (TR); dan
  - l. kawasan pertahanan dan keamanan (HK).

Selain itu, rencana revisi RTRW Kota Tidore Kepulauan juga menetapkan kawasan strategis, yakni dari kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, fungsi daya dukung lingkungan hidup, dan sosial budaya.

**Tabel 4.3 Kawasan Strategis dalam RTRW Kota Tidore Kepulauan**

No.	Kawasan Strategis	Nama Kawasan
1	Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan ekonomi	(1) kawasan Sarimalaha; (2) kawasan Rum Balibunga, Rum Balibunga dan Maitara; (3) kawasan Cobo; (4) kawasan Kota Baru Sofifi; (5) kawasan Bandara Udara Sultan Nuku; (6) kawasan Gitaraja (7) kawasan Payahe; dan (7) kawasan Maidi.
2	Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan lingkungan	(1) kawasan Taman Nasional Aketajawe Lobotata; (2) kawasan hutan lindung Kie Matubu dan Tagafura (3) kawasan hutan lindung Gunung Sinopa; (4) kawasan konservasi perairan Pulau Mare;
3	Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan sosial budaya	(1) kawasan Kota Pusaka Soasio; (2) kawasan budaya dan kearifan lokal di Gurabunga dan Kalaodi; (3) kawasan situs sejarah dan kebudayaan di Toloa dan Mareku



**Gambar 4.5**  
Peta Pola Ruang RTRW Kota Tidore Kepulauan

**E. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi



masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pembangunan berkelanjutan mencakup 3 pilar penting yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan yang harus dijalankan secara terintegrasi. Melalui konsep pembangunan berkelanjutan, maka pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan hati-hati agar generasi yang akan datang masih dapat menikmati kekayaan alam tersebut.

TPB/SDGs sendiri sudah menjadi salah satu pengarusutamaan RPJMN 2020 – 2024, artinya telah menjadi agenda nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.



**Gambar 4.6**  
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Tujuh belas tujuan tersebut selanjutnya dikelompokkan menjadi empat pilar, yakni : Pilar Pembangunan Sosial (tujuan 1, 2, 3, 4 dan 5), Pilar Pembangunan Ekonomi (tujuan 7, 8, 9, 10 dan 17), Pilar Pembangunan Lingkungan (tujuan 6, 11, 12, 13, 14 dan 15), Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola (tujuan 16).

Pengukuran keberhasilan menggunakan 67 target indikator. Saat ini Indonesia telah berhasil mencapai sebagian besar target MDGs Indonesia yaitu sebanyak 49 indikator MDGs, namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang harus dilanjutkan dalam

pelaksanaan TPB/SDGs. Beberapa indikator yang harus dilanjutkan tersebut antara lain penurunan angka kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional, peningkatan konsumsi minimum di bawah 1.400 kkal/kapita/hari, penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), penanggulangan HIV/AIDS, penyediaan air bersih dan sanitasi di daerah perdesaan serta disparitas capaian target antar provinsi yang masih lebar.

Berdasarkan analisis capaian indikator TPB di Kota Tidore Kepulauan sebagaimana dianalisis dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2021 – 2026, diperoleh indikator-indikator terpilih yang tidak mencapai target nasional maupun target daerah. Indikator yang tidak mencapai target tersebut berjumlah 48 indikator. Berdasarkan urusan konkruen pemerintah daerah, ke-48 indikator tersebut terbagi pada beberapa urusan.

Urusan tersebut diantaranya: Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Kesehatan; Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; Lingkungan Hidup; Pangan; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pendidikan; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Sosial; dan Tenaga Kerja.

Selain itu, terdapat indikator yang berkaitan dengan perekonomian yang bersifat lintas sektor, serta indikator yang berkaitan dengan urusan tata kelola pemerintahan. Pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdapat 2 indikator TPB yang terkait. Indikator tersebut berupa Presentase penduduk 0-17 dengan kepemilikan akta dan Presentase anak yang memiliki akta kelahiran. Oleh karena itu isu strategis pada urusan ini adalah terkait pencatatan kelahiran anak melalui dokumen akte kelahiran.

Pada urusan kesehatan, terdapat 16 indikator TPB yang belum tercapai. Indikator tersebut diantaranya Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita; Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita; Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta; Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 (lima) tahun, berdasarkan tipe; prevalensi anemia pada ibu hamil; Presentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapatkan ASI eksklusif; dan Presentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.

Pada urusan kesehatan, terdapat 5 indikator TPB yang belum tercapai. Indikator tersebut diantaranya Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial; Jumlah penyalahguna narkoba dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis; dan Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.

Maka berdasarkan indikator tersebut, isu strategis pada urusan ini adalah penyediaan data dan informasi tentang bahaya dan bencana yang dapat ditimbulkan oleh adanya kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Pada urusan lingkungan hidup, terdapat 2 indikator TPB yang terkait. Indikator tersebut berupa jumlah rencana pengelolaan DAS yang diinternalisasikan ke dalam RTRW, dan luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan Kawasan DAS. Oleh karena itu, isu strategis pada urusan ini adalah peningkatan pengelolaan DAS yang terinternalisasi dengan RTRW, serta pengembangan kawasan HHBK untuk mendukung pemulihan kawasan DAS.

Pada urusan pangan terdapat 2 indikator yang belum tercapai. Indikator tersebut adalah Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan, serta Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari. Oleh karena itu, rumusan isu strategis urusan ini adalah peningkatan kualitas konsumsi masyarakat yang disesuaikan dengan PPH yang dapat meningkatkan nilai gizi masyarakat. Pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat 2 indikator yang belum tercapai. Indikator tersebut adalah proporsi Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir; dan Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II). Oleh karena itu, rumusan isu strategis urusan ini adalah, peningkatan presentasi keterwakilan perempuan dalam lembaga eksekutif eselon II, dan pendampingan terhadap anak-anak korban kekerasan dalam pengasuhan.

Pada urusan pendidikan, terdapat 6 indikator yang belum tercapai. Indikator tersebut diantaranya adalah APM SMA, APM SMP, APK SD/MI, dan APK SMP. Oleh karena itu, rumusan isu strategis urusan ini adalah rendahnya tingkatan partisipasi belajar 9 tahun, serta rendahnya partisipasi dalam pendidikan tahap lanjutan, yang perlu ditingkatkan melalui pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang merata dan memadai. Pada Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman terdapat 4 indikator yang belum tercapai. Indikator tersebut adalah Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan; Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan; Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak; Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan; dan Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. Oleh karena itu, rumusan isu strategis urusan ini adalah peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum dan sanitasi yang layak aman dan berkelanjutan.

Pada Urusan sosial terdapat 3 indikator yang belum tercapai. Indikator tersebut adalah Persentase akses UMKM (Usaha Mikro kecil Menengah) Ke layanan keuangan, Jumlah strategi atau kebijakan pariwisata berkelanjutan dan pelaksanaan rencana aksi dengan perangkat monitoring dan evaluasi yang disepakati, dan Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan. Oleh karena itu, rumusan isu strategis urusan ini adalah peningkatan upaya ekonomi mikro dan menengah dalam peningkatan ekonomi masyarakat, terutama pada sektor-sektor produktif.

Pada Urusan tata kelola terdapat 5 indikator yang belum tercapai. Indikator tersebut adalah Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK); Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota); Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota); Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota); dan Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). Oleh karena itu, rumusan isu strategis urusan ini adalah peningkatan penataan dalam sistem tata kelola pemerintahan untuk menjadi lembaga yang lebih produktif.

#### 4.2.2 Penetapan Isu Strategis Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap dokumen perencanaan di atas, serta memperhatikan permasalahan daerah, maka hasilnya ditetapkan isu strategis. Isu strategis ini juga merupakan bagian dari isu strategis yang dikaji dalam dokumen KLHS RPJMD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2021 – 2026, yakni sebagai berikut:

##### A. Pembangunan Sumberdaya Manusia

Isu pembangunan sumberdaya manusia tidak hanya terkait upaya percepatan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih di bawah rata-rata IPM Nasional, tetapi terkait upaya untuk membangun sumberdaya manusia dan generasi masa depan yang berdaya saing serta memiliki karakter menghargai kebudayaan daerah sebagai bagian dari kekayaan kebudayaan nasional.

Fokus pembangunan sumberdaya manusia adalah :

- a) Meningkatkan kesehatan masyarakat, angka harapan hidup, menjadikan pola hidup sehat masyarakat sebagai gaya hidup serta, menekan angka penyakit ISPA seperti keberhasilan dalam mengeliminasi malaria.



**Gambar 4.7**

Walikota Tidore Kepulauan, Capt H Ali Ibrahim, MH Menerima Sertifikat Eliminasi Malaria (salah satu target SDGs) dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Jakarta (27 April 2021)

- b) Meningkatkan kualitas pendidikan serta angka harapan lama sekolah. Yakni dengan meningkatkan sarana dan prasarana sekolah, distribusi tenaga pengajar secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan kualitas dan kualifikasi tenaga pengajar.

- c) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuka kesempatan kerja dan lapangan usaha, serta membangun jiwa wirausaha masyarakat, mendorong masyarakat untuk dapat meningkatkan akses permodalan dari lembaga perbankan.

Untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, maka diperlukan usaha konkrit dalam rangka memperluas lapangan kerja melalui kegiatan pengembangan ekonomi kreatif, peningkatan kualitas dan ketrampilan tenaga kerja, peningkatan perlindungan tenaga kerja, pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Koperasi.

## B. Peningkatan Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional.

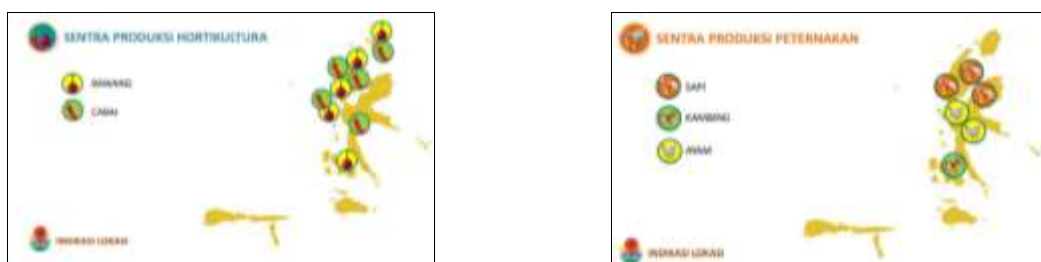
Isu strategis ini memiliki keterkaitan dengan penanganan dan permasalahan :

### 1) *Pengembangan sektor pertanian*

Luas kawasan pertanian di Kota Tidore Kepulauan adalah 34.614 Ha dengan potensi untuk pertanian perkebunan, hortikultura, tanaman pangan dan peternakan. Komoditi unggulan untuk tanaman perkebunan adalah cengkeh, pala dan kelapa. Untuk hortikultura yakni mangga dan durian, tomat, bawang, cabai. Komoditi tanaman pangan yakni sagu dan ubi. Sementara untuk peternakan adalah sapi dan ayam.

Sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar kedua PDRB Kota Tidore Kepulauan. Pengembangan sektor pertanian ini dapat disinergikan dengan RPJMD Provinsi Maluku Utara 2019 – 2024 yang menjadikan wilayah di pulau Tidore sebagai sentra produksi hortikultura dan daratan oba sebagai sentra produksi peternakan ayam.

Serta bersinergi dengan rencana pengembangan komoditi unggulan sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2019 – 2024 seperti pala, cengkeh, dan kelapa di seluruh wilayah Kota Tidore Kepulauan.



(a)

(b)

**Gambar 4.8**

Indikasi Lokasi Pengembangan Sentra Produksi Hortikultura dan Sentra Produksi Peternakan Tahun 2020 – 2024 (Sumber : RPJMD Provinsi Maluku Utara 2019 – 2024)

### 2) *Pengembangan sektor perikanan*

Sektor ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian daerah, karena selain memiliki potensi sumberdaya alam yang berlimpah, harga ikan utamanya tuna dan

cakalang sangat berpengaruh terhadap tingkat inflasi di daerah. Pada sisi lain, melimpahnya ketersediaan (*stock*) sumberdaya ikan ternyata tidak berbanding lurus dengan harga jual di pasar domestik. Karena harga ikan sangat dipengaruhi oleh musim penangkapan. Termasuk tingkat konsumsi ikan per kapita bila dibanding dengan daerah lain.

Pengembangan sektor perikanan dilakukan dengan memanfaatkan potensi perikanan tangkap di perairan Tidore dan Halmahera yang masuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 715 yang meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau.

Kawasan pengembangan perikanan budidaya meliputi : pengembangan budidaya perikanan darat di Dowora, Guraping, Koli, dan Maldi. Sementara pengembangan budidaya perikanan laut di Teluk Cobo, Pulau Mare, Pulau Sibul, Pulau Woda, Raja, Guratu, Tameng, Joji dan Desa Togeme.

Prasarana penunjang perikanan meningkatkan peran sektor perikanan yakni : rencana pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Oba atau Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Oba Utara, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Goto, rencana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rum, Gurabati, Galala, Tadupi, dan Desa Wama. Termasuk kawasan pengolahan perikanan terpadu di Desa Maitara Tengah.



**Gambar 4.9**  
Rencana Pengembangan Kegiatan Budidaya dan Prasarana Perikanan

### **3) Pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif**

Pengembangan sektor pariwisata sangat beralasan mengingat adanya kawasan di Kota Tidore Kepulauan yang memiliki : (1) daya tarik wisata sejarah dan budaya; (2) daya tarik wisata alam; dan (3) daya tarik wisata buatan.

Daya tarik wisata budaya, antara lain : Lufu Kie, Legu Gam, Dabus, Mandi Safar di Mafututu, Salai Jin, *Barang masuwen* (bambu gila), Tari-tarian adat, Legu Dou dan Paca Goya.

Daya tarik wisata sejarah, antara lain : Kedaton Kesultanan, Masjid Kesultanan Tidore, Jembatan Kesultanan Tidore, Benteng Tahula, Benteng Tore, Museum Sonyine Malige, Makam Sultan Nuku, Makam Sultan Zainal Abidin Syah, Rumah Adat Tidore, dan Kerajinan Tenun masing-masing di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore. Kadato Gimalaha Tomayou di Gamtufkange, Makam Habib Umar Al'Faroek Rahmatullah di Seli, Kerajinan Bambu dan Kediaman Gubernur Irian Barat di Tomagoba. Rumah Adat Sowohi di Gurabunga, Makam Sultan Djamaluddin (Cililiyati) di Tongowai, Makam Jou Kota di Tomalou, Kedaton Biji Nagara dan Kerajinan pandai besi di Toloa, Kerajinan gerabah di Maregam, Barang muatan kapal tenggelam (BMKT) di perairan Tongowai, Tugu Sebastian De Elcano di Rum Balibunga, Benteng Maresku di Mareku, dan Kerajinan Bambu Fobaharu.



**Gambar 4.10**  
Peta Potensi Wisata Sejarah/ Budaya dan Potensi Wisata Alam

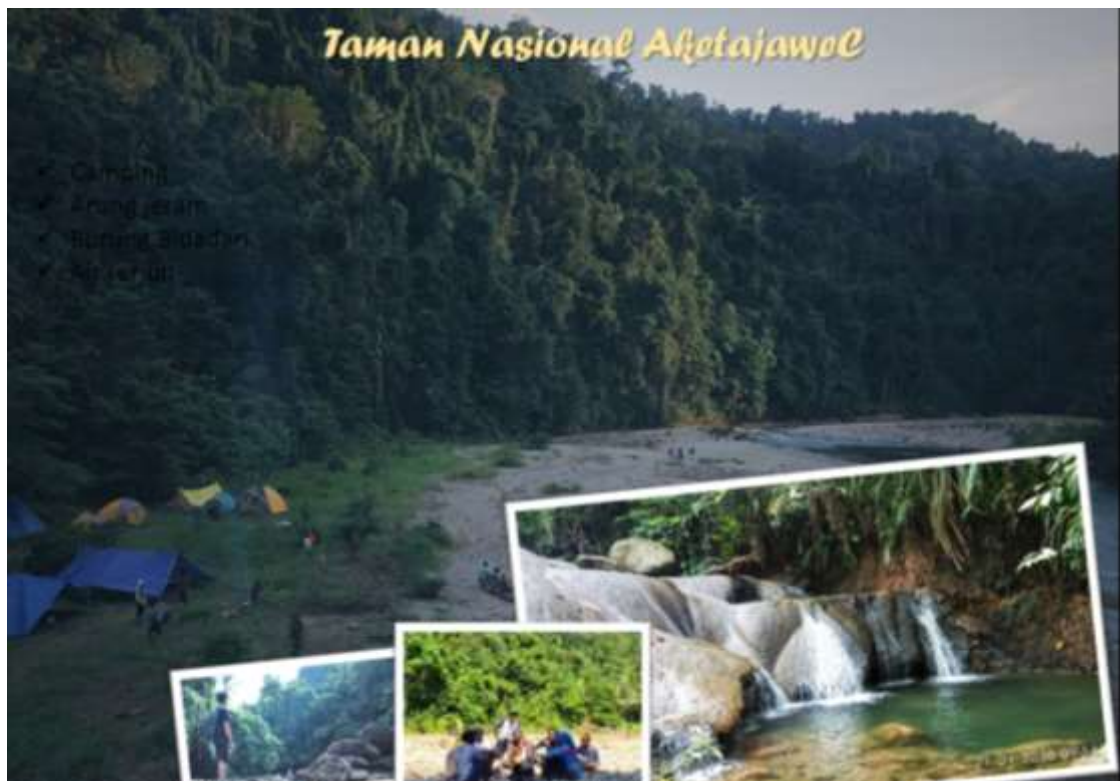
Kawasan yang memiliki daya tarik wisata alam antara lain : Pulau Maitara, Pantai Rum, Pantai Tahua, Pantai Ake Sahu di Tosa, Pantai Cobo, Pantai Gamgau di Mafututu, Pulau Failonga, Air Terjun Luku Celeng di Kalaodi, Geowisata Kalaodi dan Talaga, Pantai Tugulufa, Pulau Mare, Laguna Gurua Marasai di Guraping, Pantai Doe Masure di Balbar, Gugusan Pulau Woda, Pulau Raja, Pulau Guratu, Pulau Tameng dan Pulau Joji, Air Terjun Bay Rorai di Desa Woda, Air Terjun Sigela di Desa

Sigela, Air Terjun Havo di Desa Koli, Resort burung di Desa Koli, Spot selam di Pulau Maitara, Tanjung Rum Bune, Tahua, Jiko Cobo, Akesahu, Pulau Failonga, Cobodoe, Trikora, Tugulufa, Kotamabopo, Tanjung Soasio, Soadara, Tongowai, Pulau Mare, Pasi, Pulau Woda, Pulau Raja, Pulau Guratu, dan Pulau Joji, dan agrowisata di Kelurahan Gurabunga, Lada Ake, Kalaodi, Talaga, Jaya, Transmigrasi Kosa dan Transmigrasi Maldi.

Kawasan yang memiliki daya tarik wisata buatan meliputi : rencana pengembangan kawasan wisata Rum yang terintegrasi dengan kawasan olahraga, pengembangan kawasan pantai Tugulufa, dan Suaka Paruh Bengkok (SPB) di Desa Koli sebagai pusat edukasi dan pelestarian burung paruh bengkok khas Maluku Utara.

Potensi pariwisata tersebut belum memiliki daya saing yang signifikan karena terkait dengan permasalahan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata, utamanya akomodasi/ hotel, termasuk aksesibilitas ke kawasan pariwisata.

Dalam hal pembangunan pariwisata, perlu mengembangkan model pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism development*). Model pariwisata yang tidak berfokus pada berapa jumlah kunjungan wisatawan, tetapi lebih pada berapa lama waktu kunjungan serta keberlanjutan dari kegiatan pariwisata itu sendiri.



**Gambar 4.11**

Pesona Keindahan Taman Nasional Aketajawe di Kota Tidore Kepulauan

### **C. Pengembangan Infrastruktur Pusat Pelayanan Kota dan Kawasan Strategis**



Percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dilakukan untuk mendukung fungsi ruang dan kawasan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang, baik struktur ruang, pola ruang, termasuk kawasan strategis.

Pembangunan infrastruktur didasari perencanaan secara terpadu, efektif dan efisien termasuk dalam mendukung aktivitas masyarakat (perikanan, pertanian, pariwisata, perdagangan, perindustrian), seperti jalan tani, irigasi, embung, air bersih, pelabuhan perikanan, pasar, terminal, gedung pertemuan/ konvensi dan hotel dalam menunjang pariwisata MICE (*Meeting, Incentive, Conference, and Exhibiton*) dan rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan antara Tidore dan Ternate (Jembatan Temadore).

Percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur ini terbagi sebagai berikut :

1) Peningkatan konektivitas

Hal terkait dengan konektivitas, yakni infrastruktur jalan, pelabuhan laut dan jaringan internet. Saat ini infrastruktur jalan sudah dapat menghubungkan seluruh kelurahan dan desa se Kota Tidore Kepulauan, namun tingkat kemantapan jalan masih perlu di tingkatkan, utamanya ruas jalan Payahe – Dehepodo yang merupakan kewenangan Provinsi.

Demikian pula dengan jaringan internet yang belum dapat menjangkau ke seluruh wilayah, utamanya jaringan pita lebar. Hal ini berpengaruh pada penerapan teknologi, informasi dan komunikasi baik di Pemerintahan maupun kegiatan usaha masyarakat menjadi tidak maksimal.



**Gambar 4.12**

Konektivitas Bandara Sultan Nuku di Loleo dengan Kawasan Strategis Nasional

Terkait konektivitas, rencana pembangunan Bandar Udara Sultan Nuku di Kecamatan Oba Tengah sebagaimana yang direncanakan dalam RTRW Kota Tidore Kepulauan merupakan isu strategis, sebab bandar udara ini dapat menjadi alternatif bagi Bandar Udara Sultan Baabullah Ternate, juga merupakan bentuk dukungan pengembangan Kota Baru Sofifi serta pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru di daratan Oba.

Selain itu pembangunan jembatan Temadore (Ternate-Maitara-Tidore) yang saat ini sudah dilaksanakan *Feasibility Study*-nya oleh Kementerian PUPR juga perlu menjadi perhatian untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

## 2) Peningkatan akses air minum dan sanitasi

Akses air minum dan sanitasi merupakan bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). SPAM seperti jaringan perpipaan dan bukan perpipaan (sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan, terminal air/reservoir, bangunan penangkap mata air, pelayanan mobil tangki belum terlayani di seluruh wilayah, utamanya di Kecamatan Oba Tengah, Oba dan Oba Selatan. Demikian pula SPAL dan IPLT.

## 3) Pelayanan persampahan dan limbah

Sistem jaringan persampahan wilayah, seperti Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), Tempat Penampungan Sementara (TPS/ TPST/ TPS3R) belum tersebar di seluruh wilayah. Untuk TPA yang terbangun adalah TPA Rum Bune yang melayani pulau Tidore.

Sementara TPA Regional di Desa Tabadamai di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat yang diharapkan mendukung kebijakan pengembangan Kota Baru Sofifi belum operasional. Padahal hal ini sangat mendukung isu SDGs, berupa : penurunan sampah terbuang ke laut serta timbulan sampah yang didaur ulang.



**Gambar 4.13**  
Rencana Pengembangan Jaringan Persampahan

Olehnya itu, untuk mendukung pelayanan persampahan, perlu penambahan TPA di Kecamatan Oba Tengah serta jaringan persampahan berupa TPS/ TPST/ TPS3R yang tersebar di seluruh kecamatan.

Isu persampahan bukan saja sekedar pembangunan infrastruktur jaringan persampahan, tetapi ada beberapa persoalan lainnya yang perlu ditangani seperti : (1) merubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya; (2) memanfaatkan sampah untuk kebutuhan lain, seperti daur ulang sampah plastik atau menjadikan sampah organik sebagai pupuk kompos, dan lainnya.

#### 4) Perumahan dan Permukiman Kumuh

Perumahan dan permukiman kumuh merupakan salah satu isu nasional yang relevan dengan kondisi daerah Kota Tidore Kepulauan. Penanganan perumahan dan permukiman kumuh telah dilakukan sejak tahun 2017, yakni seluas 98,8 hektar. Penanganannya lewat program dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yakni yang dikenal dengan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) serta berkolaborasi dengan program penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTHLH) dari Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Tidore Kepulauan. Hasilnya adalah terjadi pengurangan menjadi 62,86 hektar pada tahun 2019.

Pada tahun 2020, telah dilakukan identifikasi luasan kawasan perumahan dan permukiman kumuh yakni seluas 183,78 Ha yang selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 103.1 Tahun 2020 dengan kategori rata-rata adalah kumuh ringan.

Dikatakan kumuh ringan karena berdasarkan hasil penilaian terhadap kriteria yang meliputi : bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran, memiliki skoring antara 16 – 37 yang berarti masuk dalam kategori kumuh ringan. Kriteria maupun pengkategorian dilakukan merujuk pada ketentuan yang termuat dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

5) Penanganan banjir dan genangan air

Banjir dan genangan air tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi menghambat konektivitas serta dapat berpengaruh pada perekonomian daerah. Penyebabnya dapat berupa belum tersedianya sistem drainase, rusaknya drainase atau tersumbatnya drainase bahkan tidak seimbang volume drainase dibandingkan dengan volume air sehingga terjadi luapan air.

Penanganan banjir dan genangan air dilakukan dengan normalisasi sungai, pembangunan bronjong, pembangunan tembok tepi, pembangunan drainase (primer, sekunder dan tersier atau drainase lingkungan).

Penanganan banjir dan genangan ini difokuskan penanganannya pada kawasan permukiman dan kawasan strategis ekonomi, seperti genangan air di kawasan Sarimalaha, jalan kemakmuran, banjir di Kecamatan Oba Utara akibat luapan kali Akeoba, banjir di Kecamatan Oba Tengah akibat luapan kali Akelamo, Aketobatu, Akeguraci. Sementara banjir di Kecamatan Oba akibat luapan kali Aketayawi.

6) Penataan dan peningkatan fungsi Kawasan Limau Timore

Limau Timore adalah wilayah perencanaan yang mendukung Pusat Pelayanan Kota yang meliputi Kecamatan Tidore Utara, Tidore Selatan, Tidore, dan Tidore Timur.

Penataan kawasan ini utamanya untuk (1) meningkatkan pelayanan pemerintahan skala kota dengan pembangunan gedung pemerintahan; (2) pengembangan dan penataan kawasan Sarimalaha (meliputi Tugulufa, Pasar Sarimalaha, Pelabuhan Trikora, dan PPI Goto) yang merupakan kawasan strategis pengembangan ekonomi; (3) penataan kawasan Irian Barat di Kelurahan Tuguwaji – Indonesiana; (4) penataan kawasan pusaka Soasio di Kelurahan Soasio – Gamtufkange; (5) penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH Ramah Anak Taman Siswa, RTH Tugulufa, RTH Taman Marimoi); (6) pembangunan gedung *Islamic Center* sebagai pusat peribadatan dan pengembangan spiritual; (7) pembangunan prasarana olahraga (GOR) di Cobodoe/Dowora; (8) pembangunan Monumen Bola Bumi sebagai ikon dan *landmark* Kota Tidore Kepulauan; dan (9) gedung pertemuan/konvensi dan hotel untuk pariwisata MICE (*Meeting, Incentive, Conference, and Exhibiton*).

7) Pengembangan Kota Baru Sofifi

Sebagai ibukota Provinsi Maluku Utara, Sofifi belum optimal untuk menjalankan roda pemerintahan, padahal Sofifi sendiri telah ditetapkan sebagai ibukota provinsi Maluku Utara sejak tahun 1999. Hal ini yang kemudian melahirkan kebijakan Pemerintah Pusat untuk masuk sebagai salah satu dari program kota baru sebagaimana termuat dalam RPJMN 2020 – 2024. Ada empat Kota Baru yang menjadi prioritas Pemerintah Pusat, yakni Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong. Pembangunan kota baru merupakan upaya penyelesaian permasalahan perkotaan, dengan arahan pengembangan kawasan perkotaan baru dengan konsep kota mandiri dan terpadu.



**Gambar 4.14**  
Peta Pola Ruang Rancangan RDTR Kota Baru Sofifi

Sebenarnya, empat Kota Baru sebagaimana disebutkan merupakan kelanjutan dari program pengembangan 10+1 Kota Baru pada RPJMN 2015 – 2019.

Luas delineasi kawasan Kota Baru Sofifi sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 109.1 Tahun 2018 adalah 2.840,7 Ha yang meliputi Desa Kaiyasa, Desa Gosale, Kelurahan Guraping, Desa Balbar, Desa Galala, Kelurahan Sofifi, Desa Bukit Durian, Desa Oba, Desa Ampera, Desa Somahode, Desa Garojou, Desa Akekolano dan Desa Kusu di Kecamatan Oba Utara.

Sebagai bagian dari wilayah Kota Tidore Kepulauan, pengembangan Kota Baru Sofifi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat (karena merupakan *major project* RPJMN) dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, perlu didukung oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan baik dari sisi regulasi seperti Rencana Detail Tata Ruang maupun koordinasi penyediaan tanah.

Untuk mendukung pengembangan Kota Baru Sofifi, beberapa prasarana yang dibutuhkan antara lain, TPA Regional yang terdapat di Kabupaten Halmahera Barat serta rencana pengembangan Bandar Udara Sultan Nuku di Kecamatan Oba Tengah.

#### 8) Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah, yakni :

- Pengembangan kawasan pertanian terpadu di Kecamatan Oba dan Oba Tengah. Pengembangan kawasan ini sekaligus menjadi penyanggah kebutuhan pangan untuk wilayah Tidore, Ternate, dan kawasan industri Weda. Komoditi unggulan yang dijadikan sebagai isu sentral adalah peternakan ayam (daging dan telur)

yang diintegrasikan dengan pengembangan jagung untuk mendukung kegiatan peternakan.

- Pengembangan Bandara Udara Sultan Nuku di Kecamatan Oba Tengah. Hal ini sekaligus mendukung kebijakan pengembangan Kota Baru Sofifi.

#### 9) Percepatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

Pemberlakuan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang melahirkan PP Nomor 21 Tahun 2021 mendorong adanya percepatan proses perizinan yang sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang. Faktanya kondisi saat ini, belum tersedia Peraturan Wali Kota tentang RDTR.

RDTR ini tidak hanya dibutuhkan dalam proses perizinan, tetapi menjadi materi dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang di Kota Tidore Kepulauan.

### D. Ketahanan pangan

Ketahanan pangan merupakan isu nasional yang relevan dengan kondisi Kota Tidore Kepulauan, termasuk salah satu tujuan (tujuan 2) SDGs/TPB, yakni tanpa kelaparan. Kenapa dikatakan relevan dengan kondisi Kota Tidore Kepulauan, sebab Kota Tidore Kepulauan belum mampu untuk menyediakan bahan pangan untuk kebutuhan seluruh masyarakatnya sendiri.

Ketersediaan pangan utama di Kota Tidore Kepulauan masih tergantung dari daerah di luar wilayah Kota Tidore Kepulauan (90%), hanya 10% berasal dari produksi sendiri. Komoditi yang tergolong pangan utama antara lain yaitu: beras/sagu, ubi, daging, telur, jagung, kedelai, cabe, bawang, minyak kelapa dan gula pasir.

Diperlukan langkah strategis berupa pemetaan kebutuhan masyarakat, produksi hasil pangan lokal dan menyediakan sumber-sumber pangan alternatif serta membangun sentra-sentra produksi yang bisa produktif secara berkelanjutan. Termasuk mengembangkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Dalam upaya penyediaan pangan secara mandiri dan berkelanjutan, maka diperlukan adanya terobosan program melalui konsep berkebun di pekarangan rumah atau pemanfaatan lahan kosong untuk ditanami tanaman produktif (*Urban Farming* atau Kawasan Pangan Lestari), intensifikasi lahan, pertanian organik, serta menanam tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Selain itu juga harus menjadi perhatian adalah mengenai pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) guna terpenuhinya cadangan pangan di Kota Tidore Kepulauan. Salah satu penekanan terkait hal ini adalah dalam hal pengembangan pertanian organik.

### E. Regenerasi Warisan Budaya dan Penguatan Modal Sosial

Salah satu indikator sasaran target RPJMN 2020 – 2024 dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi adalah jumlah warisan budaya yang diregenerasi (*culture heritage regeneration*). Terdapat 20 lokasi yang menjadi sasaran dalam indikator ini, salah satunya adalah Tidore.



## Regenerasi Warisan Budaya (Cultural Heritage Regeneration)



**Gambar 4.15**

Lokasi Prioritas Regenerasi Warisan Budaya  
(Sumber : Rancangan RPJMN 2020 – 2024)

Masyarakat Indonesia, tidak terkecuali masyarakat Kota Tidore Kepulauan memiliki semangat gotong royong dan tolong menolong antar sesama. Di Tidore dikenal dengan tradisi *mayae* atau *babari*. Kebiasaan ini umumnya berlaku pada pembangunan rumah ibadah dan rumah tinggal masyarakat. *Mayae* dan *bari* ini merupakan salah satu modal sosial (*social capital*) yang dapat mendukung pembangunan di Kota Tidore Kepulauan. Olehnya itu perlu dilakukan penguatan untuk dapat disinergikan dengan modal pembangunan lainnya (anggaran, sumberdaya manusia, sumberdaya alam).

Selain itu perlu membangun kepercayaan (*trust*) yang juga merupakan bagian dari modal sosial (*social capital*) untuk membentuk suatu jaringan kerja (*network*) ke luar daerah (baik pemerintah maupun swasta) dalam rangka mensinergikan pembangunan daerah-provinsi dan daerah-nasional. Upaya membangun kepercayaan terutama dengan membentuk kepastian dalam peraturan maupun penerapannya.

### F. Kelestarian Lingkungan hidup

Lingkungan merupakan milik generasi sekarang tetapi titipan generasi yang akan datang. Sebagai titipan, lingkungan hidup harus dapat dijaga dan dilestarikan kondisinya. Pada sisi yang lain, kegiatan pembangunan dan aktivitas manusia pada umumnya cenderung mengubah kondisi alam dan berpengaruh pada degradasi mutu lingkungan, seperti :

- Meningkatnya pembangunan infrastruktur, permukiman dan perambahan hutan telah berpengaruh pada tingkat ketersediaan air tanah.

- Meningkatnya aktivitas manusia berpengaruh pada meningkatnya sampah dan limbah.
- Pemanfaatan sumberdaya perairan yang tidak terkontrol mengakibatkan rusaknya terumbu karang.
- Meningkatnya jumlah kendaraan dan hadirnya PLTU cenderung menurunkan kualitas udara pada areal tertentu.
- Masih terdapat kasus penjualan satwa liar utamanya burung paruh bengkok (nuri dan kakatua).

Olehnya itu, pembangunan yang dilakukan harus dapat semaksimal mungkin dilakukan secara terintegrasi dan terkendali dengan memperhatikan kondisi lingkungan, baik daya dukung maupun daya tampung sebagai prasyarat terpenuhinya model pembangunan yang berkelanjutan. Dan dengan menggunakan metode yang ramah lingkungan serta menganut sistem 3R, yakni *Reuse* (menggunakan/ memanfaatkan Kembali), *Reduce* (mengurangi), *Recycle* (daur ulang). Pembangunan yang tidak sebatas memenuhi unsur-unsur administrasi ketentuan perundang-undangan.

Selain itu dalam konteks karakteristik pulau, Pulau Tidore, Mare dan Maitara merupakan termasuk dalam kategori pulau kecil yang daya dukung dan daya tampung terbatas. Salah satu ciri pulau kecil adalah daerah tangkapan air (*catchment area*) kecil dan resapan air sedikit. Hal ini berpengaruh pada ketersediaan sumber air tanah di masa mendatang. Pengalaman ini telah terbukti pada kejadian di pulau Ternate, pulau dengan luasan yang hampir sama dengan Pulau Tidore, Ternate kerap mengalami kekurangan pasokan air PDAM yang mengandalkan air tanah utamanya saat musim kemarau. Olehnya itu dibutuhkan upaya untuk mengatasi hal tersebut sejak dari sekarang di Pulau Tidore yang merupakan pusat aktivitas Pemerintahan dan ekonomi.

Pembangunan juga dalam rangka menjaga fungsi kawasan lindung beserta ekosistem yang berada di dalamnya, sebagaimana termuat dalam RTRW Kota Tidore Kepulauan, misalnya mendukung perlindungan spesies endemik Burung Bidadari di Taman Nasional Aketajawe dan Hiu Berjalan (*walking shark*) pada hampir seluruh perairan pulau Tidore dan Halmahera.

## **G. Penanggulangan bencana**

Bencana alam yang kerap terjadi di wilayah Kota Tidore Kepulauan adalah banjir, utamanya di Kecamatan Oba. Titik banjir ini sampai saat ini belum bisa diatasi secara terintegrasi. Selain banjir, bahaya bencana alam lainnya yang kerap terjadi adalah gempa bumi dan angin puting beliung.

Trend Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Tidore Kepulauan sejak tahun 2015 hingga saat ini mengalami penurunan. Tapi angka tersebut masih dalam kategori tinggi. Artinya, perlu ada perhatian serius untuk menurunkan angka IRB.

Perlu kebijakan untuk menurunkan angka IRB, seperti: (1) Perkuatan Kebijakan Dan Kelembagaan; (2) Pengkajian Risiko Dan Perencanaan Terpadu; (3) Pengembangan Sistem Informasi, Diklat Dan Logistik; (4) Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana; (5) Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana; (6) Perkuatan



Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana; dan (7) Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana



**Gambar 4.16**  
Peta Indeks Risiko Bencana di Indonesia Tahun 2019

#### H. Pemerintah yang melayani

Paradigma pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan diarahkan pada pemerintah yang melayani. Paradigma ini menuntut pelayanan prima pada masyarakat, sebab hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.

Wujud pelayanan prima ini dilakukan dengan pembenahan pada regulasi utamanya mempendek rantai birokrasi, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan SDM aparatur serta penataan *front office*. Sehingga diharapkan pelayanan yang diberikan bisa cepat dan tepat serta memberikan kepuasan pada masyarakat.

Pemerintah yang melayani ini merupakan bagian dari pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana yang diharapkan dapat terbangun dari hasil reformasi birokrasi. Dimana tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dengan karakteristik, memiliki integritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN.

Berikut gambaran capaian tata kelola pemerintahan dalam kurun lima tahun terakhir.

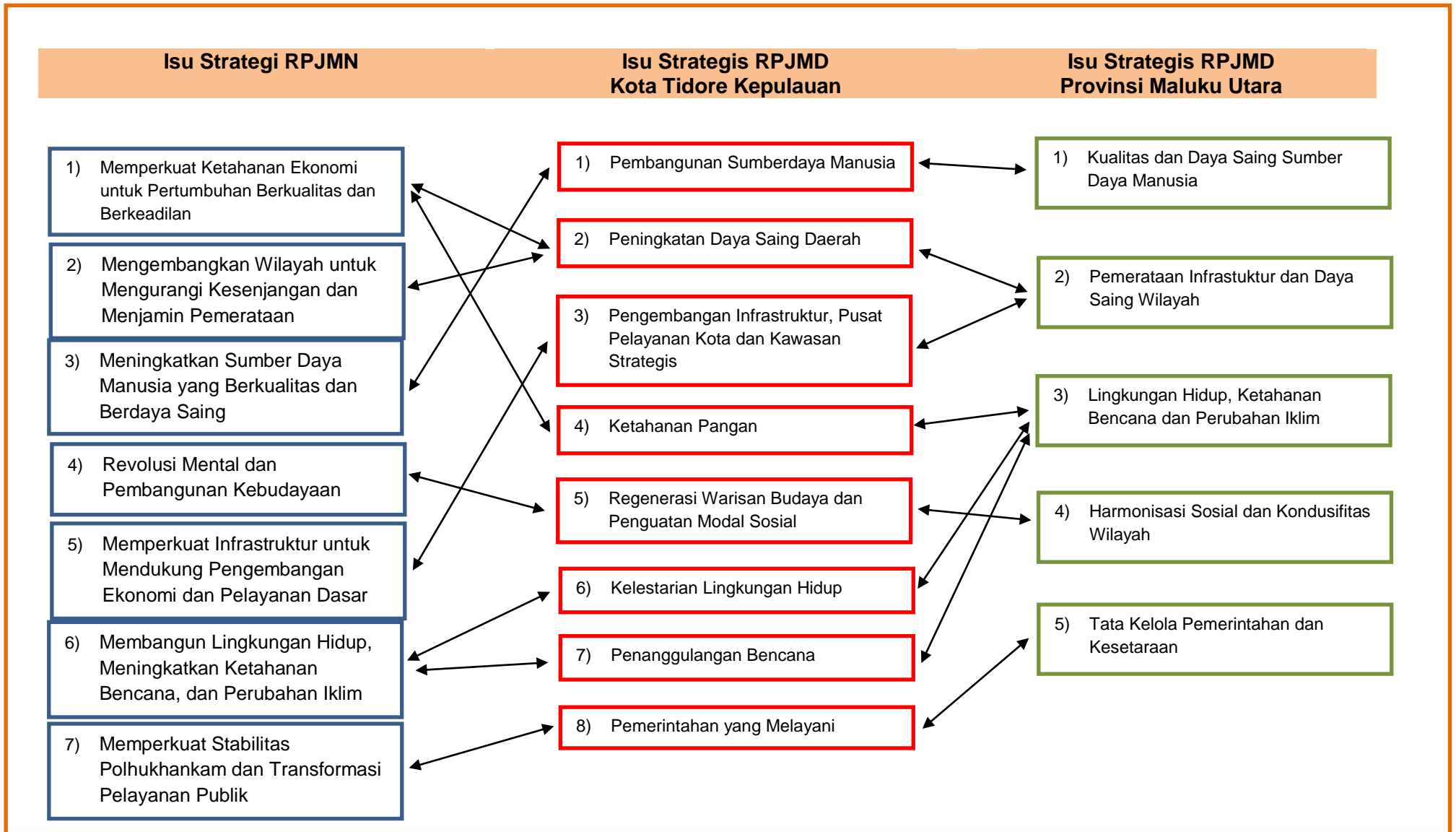
**Tabel 4.4. Capaian Tata Kelola Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 – 2020**

No	Indikator	Capaian (Tahun)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan pelayanan publik (Zona)	60 (Kuning)	70 (Kuning)	81 (Hijau)	90 (Hijau)	90 (Hijau)
2.	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

3.	Nilai LPPD	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
4.	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	25	35	50	65	75
5.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	C	CC	CC	CC	CC
6.	Indeks Profesional ASN (Skor)	25	50	60	70	80



Gambar 4.17. Benteng Tore, Salah Satu Peninggalan Sejarah yang Menjadi Obyek Wisata di Kota Tidore Kepulauan



**Gambar 4.18**  
 Hubungan Isu Strategis RPJMN, RPJMD Provinsi Maluku Utara dan RPJMD Kota Tidore Kepulauan

